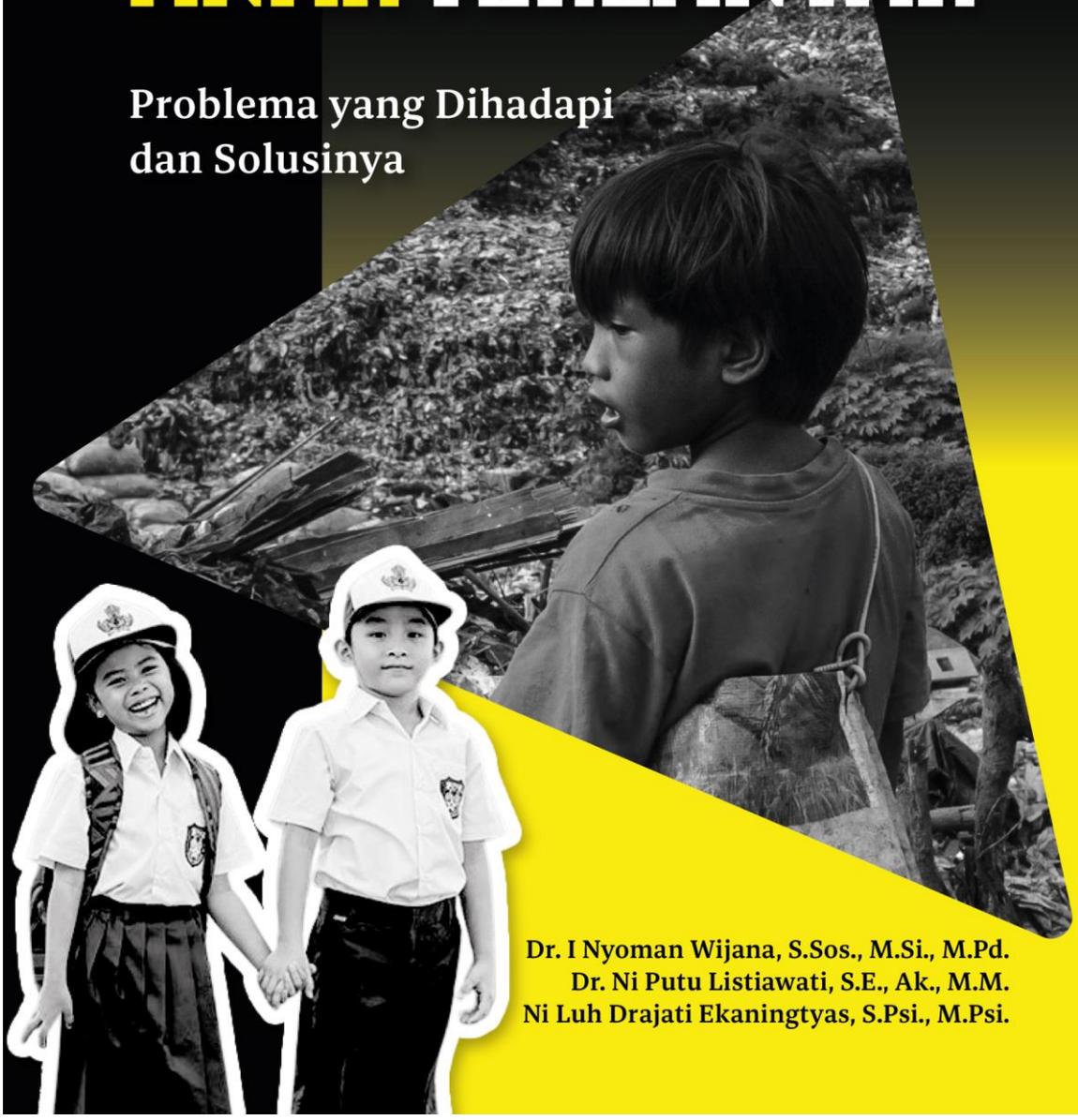


Pendidikan

ANAK TERLANTAR

Problema yang Dihadapi
dan Solusinya



Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd.
Dr. Ni Putu Listiawati, S.E., Ak., M.M.
Ni Luh Drajati Ekaningtyas, S.Psi., M.Psi.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR

Problema yang Dihadapi dan Solusinya

Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd.

Dr. Ni Putu Listiawati, S.E.,Ak.,MM

Ni Luh Drajadi Ekaningtyas,S.Psi.,M.Psi.



PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR

Problema yang Dihadapi dan Solusinya

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Desember 2021

15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-419-058-8

Penulis:

Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd.

Dr. Ni Putu Listiawati, S.E.,Ak.,MM

Ni Luh Drajati Ekaningtyas,S.Psi.,M.Psi.

Editor:

Alfiatin

Desain Cover:

Moushawi Almahi

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugraha-Nya kita dapat berkarya dalam rangka pengabdian kita kepada agama dan negara, *dharm* agama dan *dharm* negara dalam bidang tugas kewajiban kita masing-masing. Buku berjudul **“PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR; Problema yang Dihadapi dan Solusinya”** dipersembahkan kepada sumber dari segala sumber ilmu yaitu yang maha agung Tuhan Yang Maha segalanya.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan peradaban. Untuk kemajuan suatu bangsa, maka diperlukan akses yang luas dan merata bagi seluruh anak bangsa, karena hanya dengan pendidikan yang berkualitas, manusia dapat dimanusiakan, dan dibebaskan dari keterbelakangan, kebodohan, bahkan dari kemiskinan.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk menggugah para pemerhati pendidikan dan para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan untuk memberi perhatian terhadap fenomena kehidupan yang secara empiris masih banyak ditemukan, dan dialami oleh anak-anak yang kurang beruntung, khususnya anak-anak terlantar yang kesulitan memperoleh akses pendidikan, sebagaimana anak-anak lainnya. Tentu saja selain perhatian juga perlu penanganan yang serius dan komprehensif, agar kemajuan bangsa di masa depan menjadi harapan yang nyata.

Disadari sepenuhnya buku ini masih jauh dari sempurna, karenanya diskusi dari teman sejawat dan masukan-masukan untuk penyempurnaannya sangat penulis apresiasi, mudah-mudahan dengan demikian akan menjadi lebih sempurna di tahun-tahun mendatang, meskipun disadari sesungguhnya tidak pernah akan ditemukan kesempurnaan itu, karena ketika kesempurnaan ditemukan, maka akan menghentikan semua proses pencarian pengetahuan. Semoga buku yang sederhana ini yang dirujuk dari

berbagai referensi dan berdasarkan riset lapangan dapat berguna bagi penggiat pendidikan, terutama bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan bidang pendidikan.

Mataram, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	
PENDIDIKAN DAN INVESTASI SOSIAL	1
BAB II	
KONSEP ANAK DAN ANAK TERLANTAR	7
BAB III	
PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR	13
BAB IV	
KESEJAHTERAAN SOSIAL	21
BAB V	
MANAJEMEN PENDIDIKAN	25
BAB VI	
KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI	29
BAB VII	
TEORI-TEORI PEMBEBASAN	33
A. Teori Hegemoni	33
B. Teori Kekuasaan/Pengetahuan	35
C. Teori Praktik Sosial	37
BAB VIII	
FAKTOR PENYEBAB FENOMENA ANAK TERLANTAR	41
A. Kondisi Geografis	41
B. Kondisi Demografis Dan Tenaga Kerja	41
C. Kondisi Perekonomian Daerah	43
D. Pariwisata	44
E. Pendidikan	44
F. Kesehatan	45
G. Kesejahteraan Sosial	46

BAB IX	
MANAJEMEN PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR-----	55
A. Perencanaan -----	56
B. Pengorganisasian -----	60
C. Pengaktifan-----	62
D. Pengendalian-----	64
BAB X	
MODEL PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR -----	67
BAB XI	
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR -----	71
BAB XII	
AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR-----	75
BAB XIII	
MAKNA PENTING PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR -----	81
BAB XIV	
SOLUSI LAYANAN PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR -----	93
DAFTAR PUSTAKA -----	99
INDEKS -----	104
PROFIL PENULIS -----	105

BAB I

PENDIDIKAN DAN INVESTASI SOSIAL

Pendidikan secara teoritis dan empiris mempunyai peranan penting bagi maju mundurnya suatu bangsa, karena pendidikan sebagai instrumen menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah ikut memberikan andil besar terhadap terbentuknya tatanan dunia baru, yang disebut sebagai era global. Pergerakan aspek-aspek kehidupan berbangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya telah berlangsung melampaui batas-batas negara. Dunia diibaratkan sebagai sebuah kampung besar dengan segala dinamikanya, disertai teknologi informasi yang tumbuh pesat bagi penciptaan tata dunia baru yang lebih harmonis dan berperadaban.

Pembangunan sebuah peradaban yang lebih maju dan harmonis merupakan sebuah proses yang panjang, serta di dalam proses tersebut diperlukan investasi sosial. Investasi sosial yang terbaik adalah investasi sosial dalam bidang pendidikan, karena investasi pendidikan dalam rangka pembangunan modal manusia. Modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, tetapi juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan *human freedom* secara umum (Rusli Yusuf, 2011). Investasi dalam bidang pendidikan sebagai basis modal sosial merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu pendidikan juga dapat digunakan sebagai sarana pembebasan umat manusia dari belenggu kebodohan, keterbelakangan dan ketertindasan. Kebebasan dalam konteks humanisasi merupakan

fitrah manusia, namun fitrah tersebut sering diingkari melalui perlakuan tidak adil, serta penindasan. Hal itu diakui dengan adanya kerinduan kaum tertindas akan kebebasan dan keadilan, serta oleh perjuangan mereka untuk menemukan kembali harkat kemanusiaan mereka yang hilang (Paulo Freire, 2008).

Dalam proses pemanusiaan masyarakat menuju sebuah bangsa yang berbudaya, pendidikan merupakan unsur yang fundamental bagi semua bangsa untuk memberdayakan warga negaranya menghadapi perubahan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Indonesia sebagai sebuah bangsa meliputi wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar tentu tidak mudah untuk memberdayakan masyarakatnya melalui pendidikan. Meskipun demikian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 secara tegas mengamanatkan bahwa, pendidikan merupakan hak seluruh rakyat, serta bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak seluruh rakyat, terkandung makna bahwa pendidikan bukan untuk sebagian kecil masyarakat, melainkan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kebijakan nasional dalam bidang pendidikan, jika hanya mengalokasikan pembiayaan yang menyentuh masyarakat tertentu saja, maka hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, selain itu juga bertentangan dengan dengan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, jika negara belum mampu memenuhi hak warga negaranya secara adil dalam bidang pendidikan, maka tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa niscaya juga tidak dapat tercapai.

Bangsa yang cerdas dapat dimaknai sebagai bangsa yang mampu berdiri sendiri tanpa selalu mengharap bantuan dari bangsa-bangsa lain. Bangsa yang cerdas bukan hanya merupakan bangsa yang dapat bekerja, tetapi juga bangsa yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi bangsanya sendiri (Tilaar, 2009). Dengan kecerdasan sebuah bangsa, maka sumber kekayaan alam yang melimpah di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pada gilirannya akan mampu mengatasi masalah krusial setiap bangsa, seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini yaitu masalah kemiskinan dan kebodohan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak terlepas dari peran politik pendidikan. Hal tersebut dapat diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index (HDI)* yang secara langsung berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Angka *human development index* Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, namun demikian masih di bawah negara-negara lain di Asia Tenggara seperti, Vietnam, Philipina, Thailand, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara itu, dalam rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 dijabarkan bahwa tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan Indonesia ialah penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, menurunkan angka putus sekolah yang relatif masih tinggi, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan pedesaan, antara penduduk di wilayah maju dan wilayah tertinggal, dan juga antar jenis kelamin (Kemendiknas, 2010).

Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya ialah upaya peningkatan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, antar perkotaan dan pedesaan sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk juga dalam mengembangkan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup saling menghargai dalam bingkai masyarakat yang multi kultur serta meningkatkan daya saing. Selain itu kebijakan pendidikan juga diarahkan untuk menjamin keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro poor*), agar masyarakat miskin dapat memperoleh akses yang seluas-luasnya terhadap pendidikan yang bermutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era global, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia mampu meraih keunggulan dalam persaingan internasional yang tidak dapat dihindari, karena itu memerlukan dukungan manusia yang berkualitas.

Tingginya angka buta aksara secara nasional memerlukan perhatian dan strategi tersendiri untuk mengatasinya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional ke-46 Jumat 21 Oktober 2011 di Jakarta mengatakan bahwa angka buta huruf secara nasional data terakhir tahun 2011 berkisar sekitar 8,3 juta orang atau 4,6 persen dari jumlah penduduk Indonesia, sementara itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat angka buta huruf mencapai 162.265 jiwa data tahun 2010/2011. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak mampu membaca, menulis dan berhitung atau calistung masih cukup besar yang akan berimplikasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya juga mempunyai implikasi terhadap daya saing bangsa dalam menghadapi ketatnya persaingan global. Selain itu ledakan penduduk juga menjadi masalah tersendiri bagi dunia pendidikan, karena ledakan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan krisis di bidang pendidikan nasional bahkan secara internasional, dalam gagasan yang dikemukakan oleh Coombs salah satu penyebab krisis pendidikan ialah ledakan pertumbuhan penduduk (Coombs, 1979).

Selanjutnya tantangan dunia pendidikan di Indonesia juga dalam upayanya mengatasi angka putus sekolah. Menurut Nono Adya Supriatno dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa saat ini terdapat hampir 50 juta siswa miskin di tingkat SD sampai dengan SLTA. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SLTP dan 7 juta siswa setingkat SLTA. Dari jumlah tersebut 2,7 juta siswa tingkat SD terancam putus sekolah, demikian halnya pada tingkat SLTP sekitar 2 juta siswa. Data tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi sebagai tantangan bagi pengambil kebijakan dalam bidang Pendidikan (Media Center, 2011).

Tingginya angka buta aksara dan angka putus sekolah pada tingkat nasional merupakan cerminan dari kondisi serupa yang terjadi di setiap provinsi. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka buta aksara dan angka putus sekolah menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal tersebut akan dicoba diatasi dengan program Angka Buta Aksara Nol disingkat ABSANO dan program Angka *Drop Out* Nol disingkat ADONO sebagai program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Angka penduduk buta aksara yang tercatat pada Dinas Dikpora Provinsi NTB untuk tahun 2009 sejumlah 417.277 orang yang tersebar di seluruh

kabupaten kota, sedangkan tahun 2010 tercatat sebanyak 340.344 orang dan tahun 2011 tercatat sebanyak 162.265 orang.

Selain data penduduk buta huruf yang masih relatif tinggi, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menghadapi tantangan dalam bidang pendidikan berupa angka putus sekolah (*drop out*) yang juga relatif tinggi. Data tahun 2009 yang tercatat pada Dinas Dikpora Provinsi NTB menunjukkan jumlah siswa dari tingkat SD sampai dengan SLTA sebanyak 1.061.216. Sepanjang tahun 2009-2010 jumlah siswa SD yang mengalami putus sekolah sekitar 6000 siswa dari 600.000 siswa. Sedangkan tingkat SMP tercatat sekitar 3000 siswa mengalami putus sekolah dari jumlah keseluruhan sebanyak 170.000 siswa, dan pada tingkat SMA tercatat sekitar 2000 siswa mengalami putus sekolah dari sekitar 92.000 siswa. Sementara itu jumlah siswa SMK secara keseluruhan tahun 2009 sebanyak 43.000 yang mengalami putus sekolah sebanyak 890 orang. Selanjutnya di tingkat MI jumlah siswa 73.000 yang mengalami putus sekolah sebanyak 1500, sedangkan di tingkat MTS jumlah siswa 87.281 siswa, yang mengalami putus sekolah sebanyak 696 siswa. Selanjutnya pada tingkat MA jumlah siswa sebanyak 50.000 dari jumlah tersebut yang mengalami putus sekolah sebanyak 859 siswa. Dengan demikian secara keseluruhan jumlah siswa dari tingkat SD sampai dengan SLTA baik sekolah di bawah binaan Dinas Dikpora maupun Kanwil Kementerian Agama sebesar 1.061.216 siswa dan yang mengalami putus sekolah secara keseluruhan sebanyak 14.945 siswa. Hal tersebut menunjukkan angka *drop out* yang sangat tinggi di tengah-tengah upaya keras bangsa Indonesia untuk memerangi kebodohan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era global dewasa ini.

Seiring dengan tingginya angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki implikasi terhadap tingginya angka anak-anak terlantar pada usia sekolah. Dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 34 terkandung makna bahwa anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk memeliharanya, tentu juga termasuk memberi ruang yang sama dengan anak-anak yang lain dalam hal pendidikannya. Dengan demikian pendidikan haruslah dibangun untuk sebuah peradaban dengan kesamaan hak sosial, bukan untuk menyumbangkan ketidaksamaan sosial yang mengakibatkan penganiayaan simbolik (*symbolic violence*) (Bourdieu, 2009).

Secara nasional jumlah anak-anak terlantar di Indonesia menurut Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, berkisar pada angka 5,4 juta jiwa pada tahun 2011. Hal ini disampaikan saat pertemuan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Minggu 14 Maret 2010. Selanjutnya dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan anak-anak terlantar itu tentu tidak sehat, karena hidupnya cenderung berkeliaran, tidak di rumah dan kurang mendapat perlindungan seperti kesehatan, akses belajar dan lain-lain. Anak-anak terlantar tersebut berusia di bawah 18 tahun yang menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberi definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fenomena anak-anak terlantar tersebut merupakan anak-anak yang belum mampu bertanggung-jawab atas dirinya sendiri, sehingga masih memerlukan tanggung jawab orang lain yaitu keluarga, masyarakat dan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dasar.

Anak-anak terlantar yang berjumlah 4,5 juta jiwa di Indonesia, menurut data statistik BPS NTB tahun 2009 sebanyak 201.699 jiwa berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari jumlah anak terlantar yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut sebagian besar belum tersentuh pendidikan. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak penyandang masalah sosial khususnya anak-anak terlantar. Pertanyaan mendasar ialah bagaimana fenomena sosial ini mendapat penanganan yang baik dan adil terutama berkaitan dengan hak-hak yang melekat pada anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesehatan dan pendidikan.

BAB II

KONSEP ANAK DAN ANAK TERLANTAR

Secara teoritis, konsep tentang anak dan anak terlantar didefinisikan secara beragam sesuai dengan kepentingan yang melatar-belakanginya. Yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, memberi definisi bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Definisi kedua ini sejalan dengan definisi yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang memberi definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari tiga definisi tentang anak yang dikemukakan dalam undang-undang maupun keputusan presiden, maka dapat kita rumuskan definisi operasional bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Demikian halnya tentang pengertian anak terlantar, selain beberapa pengertian anak terlantar sebagaimana yang termuat dalam undang-undang juga ada pengertian yang dikeluarkan oleh para ahli atau institusi tertentu. Dinas Sosial Provinsi Lampung misalnya memberikan definisi tentang anak terlantar yaitu anak yang berusia 5 sampai dengan 18 tahun, yang karena hal tertentu (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang

tua/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/ wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Pasal 1 ayat 7 mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Definisi tersebut senada dengan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Sementara itu Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial mengajukan kriteria anak terlantar dengan memberi penekanan kepada hal-hal yang bersifat fisik, tercermin dari kriteria anak terlantar sebagai berikut:

- a. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar (wajar 9 tahun).
- b. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu.
- c. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati kurang dari 4 kali, hewani kurang dari 2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu.
- d. Memiliki pakaian layak pakai kurang dari 4 stel.
- e. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur.
- f. Bila sakit tidak diobati.
- g. Yatim piatu, atau bapak kandung bukan anggota rumah tangga.
- h. Bekerja/membantu memperoleh penghasilan (penduduk usia di bawah 15 tahun) (Soemarno, 2004).

Kriteria tersebut kemudian digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan tingkat keterlantaran anak. Jika seorang anak memenuhi minimal tiga kriteria tersebut maka dapat digolongkan sebagai anak terlantar, sedangkan jika anak bersangkutan memenuhi dua dari kriteria tersebut, maka anak bersangkutan digolongkan sebagai anak rawan terlantar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dirujuk oleh (Nasirin; 2010) melakukan pemetaan terhadap konsep anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat menjadi 5 katagori yaitu, (1) anak terlantar, (2) anak balita terlantar, (3) anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, (4) anak nakal, (5) anak jalanan. Masing-masing kategori tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Anak terlantar, ialah anak yang berusia 5 sampai 21 tahun, belum pernah menikah, dan akibat kelalaian orang tua sehingga kebutuhan jasmani rohani dan sosial tidak terpenuhi. Anak terlantar memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu; tidak terpenuhi kebutuhan dasar, tidak punya pekerjaan tetap dan terlepas dari ikatan keluarga, serta tidak mempunyai tempat tinggal untuk kembali. Selain anak terlantar terdapat juga anak balita terlantar yaitu, anak yang berusia 0 sampai 4 tahun yang terlantar asuhannya, pendidikan dan perlindungan, sehingga kebutuhan dasar jasmani, rohani dan sosial tidak terpenuhi. Anak balita terlantar ini memiliki ciri-ciri: ditinggalkan orang tua, tanpa pengasuh, ditinggalkan di rumah sakit, kurang gizi, tidak terurus, tidak mendapat akses pendidikan dan keluarga fakir miskin.

Selain fenomena anak terlantar dan balita terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terdapat fenomena anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah. Fenomena ini diberikan definisi yaitu anak yang berusia 5 sampai 21 tahun dan belum menikah, mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah dalam lingkungan keluarga atau sosial, sehingga kebutuhan dasar jasmani, rohani dan sosial tidak terpenuhi. Kelompok anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah tersebut mempunyai ciri-ciri: anak diperjual belikan, atau korban penganiayaan, anak mengalami tindak kekerasan atau salah perlakuan. Sedangkan anak nakal diberikan definisi sebagai anak yang berusia 5 sampai 21 tahun dan belum menikah serta berperilaku menyimpang dari norma dan tradisi yang berlaku di masyarakat, sehingga merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Anak yang tergolong anak nakal ini memiliki ciri-ciri seperti; tidak mampu mengurus diri sendiri, sering memeras, sering merusak barang, memancing keributan dan bertindak kriminal.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lainnya ialah anak jalanan. Anak jalanan ini diberikan definisi sebagai anak yang berusia 5 sampai 21 tahun dan belum menikah, menghabiskan

sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan serta di tempat-tempat umum. Fenomena anak jalanan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, cari nafkah membantu orang tua, ada yang bersekolah walaupun sebagian besar tidak bersekolah, keluarga tidak mampu, melarikan diri dari rumah, tidur di emperan pertokoan atau di terminal, pedagang asongan, pengamen, penjual Koran dan kusir cidomo.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibangun fisik dan mentalnya guna mempersiapkan dirinya untuk menjadi manusia dewasa yang bertanggung-jawab. Dalam membangun fisik dan mental anak tersebut diperlukan pendidikan, karena fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab.

Pendidikan nasional yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sangat indah itu, tentu diperuntukkan bagi semua warga negara, dan bukan untuk kalangan masyarakat yang mampu dari segi ekonomi saja, tetapi juga menjadi hak bagi anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Hal ini dipertegas pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan beberapa hak anak seperti; (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna, (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik

semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Jika kita telaah secara saksama tentang banyaknya hak-hak anak yang telah dituangkan ke dalam berbagai undang-undang, maka pada hakikatnya kita dapat identifikasi menjadi beberapa hak dasar dari seorang anak manusia, yaitu hak untuk hidup yang layak, hak atas kesejahteraan, hak atas perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, hak untuk dilindungi dan yang sangat penting dan tetap menjadi isu kritis dalam kehidupan bangsa Indonesia ialah hak untuk memperoleh pendidikan.

Namun demikian, dalam tataran empiris kita disuguhkan fakta-fakta bahwa pendidikan baru bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu secara ekonomi. Sedangkan anak-anak terlantar umumnya adalah orang-orang miskin, meskipun orang miskin bukanlah orang bodoh (Saroni, 2011). Anak-anak terlantar pada umumnya mempunyai kemampuan intelegensi yang tidak jauh berbeda dengan orang lainnya. Akan tetapi diskriminasi yang diterima oleh anak-anak terlantar tersebut membuat usaha mereka untuk mensejajarkan diri dalam bidang pendidikan menjadi sangat sulit, terutama menyangkut pemenuhan biaya pendidikan yang mahal. Anak-anak miskin dan terlantar yang harus keluar dari sekolah karena tidak mampu membayar kebutuhan untuk sekolahnya merupakan cerita yang lazim di negeri tercinta.

BAB III

PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR

Kemiskinan selalu didefinisikan beragam oleh berbagai ahli, menurut Caroline Thomas sebagaimana dirujuk oleh Budi Winarno menjelaskan bahwa pada umumnya perbedaan memberikan definisi tentang kemiskinan bergantung pada perbedaan mereka melihat pembangunan (Winarno, 2011). Namun demikian ada beberapa aspek dari definisi kemiskinan yang disepakati oleh para ahli berkaitan dengan kebutuhan material seperti kekurangan makan, air bersih, sanitasi, sedangkan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat nonmaterial belum ada kesepakatan.

Selanjutnya menurut Piven dan Cloward yang didukung oleh Swanson sebagaimana dipertegas dalam Budi Winarno (2011) memberi definisi kemiskinan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan material. Selanjutnya dijelaskan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Kemiskinan dalam konteks kekurangan materi digambarkan sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar. Oleh karena itu kemiskinan dalam perspektif ini sering dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat pokok. Sedangkan kekurangan penghasilan yang memadai dipahami sebagai standar atau garis kemiskinan yang berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya kemiskinan dalam dimensi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social ekclusion*), ketergantungan dan ketidak-mampuan berpartisipasi dalam masyarakat.

Kemiskinan dalam dimensi yang ketiga ini berkaitan dengan akses pendidikan bagi anak-anak terlantar, karena kemiskinan dalam dimensi ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan informasi.

Pendefinisian tentang kemiskinan dalam dimensi yang berbeda dikemukakan David Cox (Budi Winarno, 2011) yang mengemukakan beberapa dimensi kemiskinan berdasar katagori penyebab munculnya kemiskinan yaitu (1) kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi, (2) kemiskinan akibat pembangunan (3) kemiskinan sosial (4) kemiskinan konsekuensi.

Globalisasi ternyata dapat menjadi penyebab kemiskinan, jika dilakukan analisis logis hal ini cukup beralasan, karena globalisasi identik dengan kompetisi dalam segala aspek. Secara logis kompetisi semestinya dimulai dengan start yang sama, sedangkan yang terjadi secara empiris ialah ketimpangan kompetisi antara negara maju dengan negara-negara berkembang, sehingga kompetisi mengakibatkan kemenangan yang mutlak pada negara yang memiliki start jauh di depan negara berkembang. Hal inilah menimbulkan kemiskinan bagi negara-negara yang kalah dalam kompetisi. Sementara itu kemiskinan akibat pembangunan dijelaskan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya pembangunan, kemiskinan akibat marginalisasi pedesaan dalam pembangunan, dan kemiskinan perkotaan yang disebabkan oleh percepatan pertumbuhan perkotaan yang tidak menyentuh masyarakat miskin kota. Sedangkan kemiskinan sosial merupakan kemiskinan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas seperti anak jalanan, anak-anak terlantar, perempuan pesisir dan sebagainya. Dan juga kemiskinan konsekuensi yang terjadi akibat faktor-faktor eksternal kelompok-kelompok miskin seperti konflik sosial, bencana alam, kerusakan lingkungan, tingginya jumlah penduduk.

Pendidikan merupakan sebuah proses yang panjang bagi seorang anak manusia untuk menemukan esensi dari kehidupannya yakni kebebasan (Azzet, 2011). Secara kodrati setiap insan dilahirkan ke dunia bersamaan dengan esensi kemanusiaannya yaitu kebebasan. Dengan demikian sesungguhnya antara sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sama sekali tidak ada ruang toleransi untuk saling menindas, karena selain menyimpang dari kodratnya sendiri

sebagai manusia juga melanggar hak orang lain untuk menemukan esensi kehidupannya.

Pendidikan sebagai sarana pembebasan umat manusia digagas oleh Paulo Freire (2008) dalam tulisannya yang ia beri judul dengan pendidikan kaum tertindas. Dia selanjutnya mempertegas bahwa merupakan suatu kekeliruan jika pendidikan menjadikan manusia-manusia yang terdidik justru membelenggu manusia lainnya dengan kekuasaan yang dimilikinya, lebih-lebih jika terjadi fenomena kaum terdidik tidak bisa menghargai hak kebebasan manusia yang sama-sama ciptaan Tuhan dihadirkan di muka bumi untuk menjalani kehidupannya. Dengan diperolehnya kebebasan umat manusia melalui pendidikan berarti mereka harus membuang identitas palsu dirinya dan menggantinya dengan otonomi dan tanggung jawab. Masalah sentral bagi manusia adalah humanisasi yang harus diperjuangkan. Karena sejarah menunjukkan bahwa humanisasi dan dehumanisasi merupakan alternatif yang riil. Akan tetapi hanya humanisasi saja yang merupakan panggilan manusia yang sejati, akan tetapi sering disangkal dan diputar-balikkan oleh ketidakadilan, eksploitasi dan kekerasan oleh kaum penindas. Dalam situasi seperti itu kaum tertindas rindu akan kebebasan dan keinginan untuk merenggut kembali kemanusiaannya yang hilang (Freire, 2008). Konsep ini sangat relevan dengan konteks pendidikan bagi anak-anak terlantar, karena ketika anak-anak terlantar bisa memperoleh akses pendidikan, maka mereka lebih mudah dapat menemukan esensi kemanusiaannya yaitu kebebasan dan dengan kebebasan mereka menjadi manusia yang lebih otonom dan bertanggung jawab.

Kisah Siswadi anak jalanan di Jakarta yang menjadi presiden direktur sebuah lembaga bimbingan belajar merupakan sekelumit bukti akan arti penting gagasan Paulo Freire tentang pentingnya pendidikan menuju kebebasan umat manusia. Seorang anak jalanan membuat testimoni bahwa dia telah menemukan secercah harapan dalam kubang kesedihannya, ketika dia mampu menyelesaikan sekolah dasar dengan bantuan orang lain yang dikenalnya saat bertemu di jalanan. Dengan sekolah ia yakin segalanya akan lebih baik, walaupun ia tidak tahu sama sekali dari mana ia akan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-harinya, tetapi dia sudah memiliki semangat dan harapan. Semangat dan harapannya itulah yang terus membantunya bertahan menghadapi segala rintangan. Semangat itu juga dipacu oleh anggapannya tentang sekolah, baginya sekolah

bukanlah tempat belajar, tetapi sekolah merupakan tempat bermain dan bergembira bersama teman-temannya (Siswadi, 2011).

Gagasan dan tindakan yang dilakukan oleh Paulo Freire adalah pendidikan penyadaran dalam diri peserta didik menuju pemanusiaan yang sebenarnya. Pendidikan yang semacam ini merupakan hak setiap anak manusia tanpa kecuali. Tidak ada manusia yang lebih layak untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan yang lain dijauhkan dari pendidikan. Dalam praktiknya pendidikan yang membebaskan menurut Freire ini memang ditujukan untuk kaum yang tertindas di Brazil, akan tetapi tidak menempatkan kaum yang tertindas itu berhadapan secara berseberangan dengan orang-orang yang menindas. Menurut Freire pendidikan semacam itu akan menimbulkan dendam di kemudian hari sehingga sangat memungkinkan akan terjadi menindas secara bergantian. Jika hal itu terjadi, maka pendidikan sebagai pembebasan tidak akan pernah terwujud.

Pelaksanaan pendidikan yang membebaskan di Indonesia bagi rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya pendidikan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) diamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya pada Ayat (3) diamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pengertian dipelihara oleh negara tentu secara implisit bermakna bahwa negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar bersama dengan hak-haknya sebagai anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, kesehatan, hak sosial dan hak memperoleh pendidikan. Hal ini diamanatkan secara jelas dalam pasal sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Selama ini memang telah terjadi fenomena bahwa anak-anak terlantar adalah anak-anak miskin, dan anak-anak miskin identik dengan anak-anak bodoh. Jika keinginan untuk memutus mata rantai, miskin, bodoh dan terlantar melalui pendidikan, maka itu dapat diberi makna sebuah proses pembebasan yaitu pembebasan dari kemiskinan dan kebodohan dan tentu saja pembebasan dari keterlantaran. Sesungguhnya kemiskinan hanyalah kondisi yang memaksa seseorang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi

tuntutan dunia pendidikan, sementara kebodohan itu sendiri merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang setelah diukur dalam sebuah proses pembelajaran. Itu berarti kemiskinan sesungguhnya tidak identik dengan kebodohan, tetapi kemiskinan dapat menghilangkan kesempatan seseorang untuk memperoleh pendidikan, mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan, karena secara ekonomi mereka miskin, dan secara sosial mereka termarginalkan.

Orang miskin bukanlah orang bodoh. Pernyataan ini menjadi penting untuk para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sebuah proses pendidikan. Kemiskinan memang dapat menyebabkan terhambatnya kesempatan seseorang untuk mengikuti proses pendidikan, tetapi bukan berarti orang-orang miskin adalah orang-orang bodoh (Saroni, 2011). Konsep ini perlu dikembangkan sebagai basis pemikiran sehingga tidak terjadi penghakiman terhadap kaum marginal sebagai orang-orang yang tidak berguna. Untuk hal tersebut maka pemerintah harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak terlantar untuk memperoleh pendidikan, agar terbebaskan dari kebodohan dan kemiskinan. Bahkan anak-anak terlantar seharusnya mendapat perhatian semua pihak agar mereka dapat mengembangkan diri secara proporsional, sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki untuk menatap kehidupannya di masa datang.

Dalam konteks pendidikan sebagai sarana pembebasan, maka hal utama yang diharapkan oleh masyarakat adalah kemudahan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan telah menjadi penentu posisi suatu bangsa dalam tata pergaulan antar bangsa. Sebuah bangsa yang mengedepankan tingkat pendidikan masyarakatnya maka bangsa tersebut akan lebih cepat mencapai kemajuannya dalam semua aspek kehidupannya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta juga di bidang pertahanan dan keamanannya.

Namun demikian dalam tataran praktis, memang sebuah fakta bahwa orang-orang miskin, anak jalanan dan anak terlantar cenderung tidak memperoleh akses pendidikan. Suyadi (2011) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak miskin tidak bisa sekolah yaitu, (1) faktor keyakinan yang salah

terhadap sekolah, (2) wawasan yang terbatas tentang dunia pendidikan, (3) menganggap dirinya tidak secerdas orang kaya, (4) anggapan keliru tentang pentingnya sekolah, (5) kebiasaan menyalahkan pemerintah, (6) sikap mudah pasrah pada keadaan, (7) kebiasaan meniru tetangga, (8) ketidaktahuan mengenai program pendidikan gratis.

Keyakinan yang salah terhadap sekolah, merupakan faktor pertama yang bisa menjelaskan alasan kebanyakan orang miskin, anak terlantar, anak jalanan tidak bisa mengenyam pendidikan. Pada orang-orang yang menyandang masalah kesejahteraan sosial seperti terjerat kemiskinan, terlantar, dan anak-anak jalanan cenderung terpatri keyakinan negatif dalam benaknya tentang pendidikan. Bahwa bagi mereka pendidikan tidak akan mungkin bisa dijangkaunya. Keyakinan yang ada dalam diri mereka ialah bahwa pendidikan merupakan hak orang-orang kaya, sehingga bagi mereka tidak penting untuk memikirkannya. Sikap seperti itu tentu saja tidak dapat diklaim sebagai kesalahan dari masyarakat semata-mata. Dalam konteks masyarakat marginal seperti anak-anak terlantar misalnya, sikap seperti itu mempunyai alasan yang kuat secara empiris, karena memang secara faktual sekolah itu menjadi barang mahal bagi mereka. Padahal semua ahli pendidikan sepakat bahwa investasi sosial yang terbaik adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan komunitas sebagai basis modal sosial sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (Yusuf, 2011).

Keyakinan yang salah terhadap pendidikan ditambah lagi dengan wawasan yang terbatas tentang dunia pendidikan, mengakibatkan kemungkinan sekolah bagi anak-anak miskin, anak jalanan dan anak-anak terlantar menjadi semakin terbatas. Keterbatasan pengetahuan atau wawasan tentang dunia pendidikan bagi masyarakat miskin, menyebabkan hasrat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya menjadi rendah bahkan tidak ada. Kebanyakan orang tua seperti itu menilai pendidikan itu merupakan sesuatu yang mahal, berat dan hanya untuk orang kaya. Sikap seperti itu menimbulkan sikap pesimis, sehingga tidak ada upaya sama sekali untuk mencoba menuju bangku sekolah.

Faktor lainnya yang juga menyebabkan sulitnya orang-orang miskin memperoleh pendidikan ialah anggapan mengenai kecerdasan. Kebanyakan orang miskin berasumsi bahwa mereka tidak

memiliki kecerdasan seperti yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Sehingga mereka secara permanen membuat asumsi bahwa sekolah hanyalah untuk orang-orang cerdas, dan orang-orang cerdas itu ialah orang-orang kaya. Selain itu masyarakat miskin masih dalam tataran berpikir bagaimana untuk bertahan hidup, sehingga mereka beranggapan sekolah atau pendidikan itu tidaklah penting. Karena yang lebih penting bagi mereka ialah menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupannya, bagaimana mendapatkan makan, membayar hutang, dan sebagainya, sedangkan sekolah tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan instan. Sikap menyalahkan pemerintah sebagai faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, membuat mereka apatis dengan program-program pemerintah yang dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, termasuk program-program sekolah gratis, dalam tataran empiris program-program tersebut memang masih jauh dari harapan.

Sikap mudah menyerah pada keadaan, putus asa atau tidak ada sikap berani menghadapi tantangan dapat menjauhkan masyarakat marginal seperti anak jalanan, anak-anak terlantar dan anak-anak miskin dari pendidikan. Sikap mudah menyerah yang dibiarkan secara terus menerus dapat menjadi karakter. Karakter yang demikian dapat menghilangkan upaya dan keberaniannya untuk memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Hal tersebut diperparah lagi dengan kebiasaan meniru lingkungan sekitar tempat mereka hidup. Jika lingkungan mereka tidak ada yang bersekolah, apalagi bagi yang dianggap memiliki dana untuk menyekolahkan anaknya, tetapi mereka tidak melakukannya, maka secara kuat akan berkontribusi terhadap tidak adanya keinginan mereka untuk bersekolah. Sikap meniru, dan pengaruh lingkaran kemiskinan pada lingkungan sekitarnya membuat kebanyakan masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kebodohan.

Satu hal yang merupakan faktor penting untuk menjadi wawasan bersama, ialah bahwa masyarakat pada umumnya dan masyarakat marginal khususnya tidak memiliki akses informasi tentang program pendidikan gratis. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka cenderung berprasangka negatif terhadap sekolah, yang berdampak pada sikap apatis, tidak peduli terhadap masa depan anak-anaknya sendiri, karena bagi mereka sekolah merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan untuk anak-anak mereka yang miskin,

maka lebih baik bagi mereka menelantarkan anak-anak mereka, atau mempekerjakan mereka untuk membantu ekonomi orang tua, seperti berjualan, mengemis di jalan-jalan dan sebagainya.

Demikian dilematis fenomena kemiskinan dan kebodohan dalam membebaskan umat manusia menuju manusia yang otonom dan bertanggung jawab, sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah mata rantai yang sulit diputus dengan skala prioritas. Apakah dimulai dari kemiskinan ataukah dimulai dari kebodohan. Dalam tataran empiris kemiskinanlah merupakan faktor kritis yang menyebabkan banyak anak-anak menjadi terlantar dan tidak dapat memperoleh akses pendidikan, sehingga diasumsikan mereka menjadi bodoh. Namun demikian dalam tataran teoritis kebodohanlah yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat miskin. Dalam pemikiran yang sangat ideal sepertinya kemiskinan dan kebodohan merupakan dua sisi mata uang yang sama pentingnya memberi makna terhadap nilai dari uang tersebut. Sehingga memang menjadi sangat bijaksana jika dapat diputus mata rantai tersebut secara bersamaan. Namun demikian dalam konteks pendidikan tentu penting memberi prioritas untuk memutus mata rantai kebodohan, karena dengan menghilangkan kebodohan manusia menjadi bebas memiliki otonomi dan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Dengan manusia-manusia yang cerdas, maka mereka akan berkreasi dan berinovasi dalam upayanya untuk memangkas kemiskinan.

Dari uraian tentang konsep-konsep kemiskinan dan esensi pendidikan anak terlantar, maka dengan jelas dapat dikatakan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh riil terhadap upaya memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin seperti anak-anak terlantar, anak-anak jalanan dan sebagainya. Selain itu karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan memperoleh akses pendidikan, maka masyarakat menjadi terbelenggu oleh kebodohan. Masyarakat yang terbelenggu oleh kebodohan akan sulit melepaskan diri dari kungkungan kemiskinan. Jadi kemiskinan, kebodohan, merupakan mata rantai yang harus diputus dengan pendidikan. Hanya dengan pendidikan masalah kebodohan dapat diselesaikan, dan dengan tuntasnya masalah kebodohan, kemiskinan niscaya dapat teratasi. Dalam konteks ini tentu saja masyarakat marginal khususnya anak-anak terlantar.

BAB IV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seagaimana termuat dalam sila kelima dari Pancasila, dapat dikatakan sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia, hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi, melalui pengembangan dan pengintegrasian pranata kebijakan ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan (Latif, 2011).

Kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan dapat kita asumsikan akan menyentuh kebijakan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan, yang akan menyentuh masyarakat yang selama ini termarginalkan yaitu masyarakat miskin, anak-anak terlantar, anak-anak jalanan dan anak-anak penyandang masalah sosial lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Yudi Latif (2011) bahwa sebagai katalis untuk menghadirkan pranata kebijakan ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan itu, para pendiri bangsa menghendaki penjelmaan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (dalam istilah Yamin) atau negara pengurus (dalam istilah Hatta). Dalam mengemban kewajibannya, negara kesejahteraan atau negara pengurus memiliki basis legitimasi kesejahteraan, sejauh dapat menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mampu mengembangkan perekonomian sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan serta mengembangkan berbagai sistem jaminan sosial.

Gema keadilan dan kemakmuran di Indonesia berdimensi kenangan (*backward looking nostalgia*) dan berdimensi harapan (*forward looking nostalgia*). Berdimensi kenangan karena kisah yang dituturkan baik oleh sejarah lisan maupun tulisan melukiskan bahwa kepulauan nusantara pra kolonial adalah suatu rangkaian dari gugus kemakmuran (*belt of prosperity*). Sedangkan berdimensi harapan karena setelah penjajahan berlalu, penderitaan dan kemiskinan rakyat akan ditransformasikan ke dalam daya pencapaian agung, keadilan dan kemakmuran. Dan untuk mencapai harapan keadilan dan kemakmuran itu, syarat—syarat badaniah dan syarat-syarat ruhaniah menjadi sangat penting. Hal tersebut dijelaskan panjang lebar oleh Soekarno sebagaimana dirujuk oleh Yudi Latif (2011).

Dalam konteks pencapaian keadilan dan kemakmuran yang berdimensi harapan tersebut, secara eksplisit disyaratkan adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan fisik dan mental, dalam istilah Soekarno menggunakan syarat badaniah dan ruhaniah. Kedua syarat tersebut tentu pendidikan menjadi sangat relevan, bahkan mungkin menjadi satu-satunya solusi dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk mampu menggapai cita-cita kemakmuran dan keadilan tersebut. Untuk mencapai keadilan sosial tersebut ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang, untuk mengatasi masalah sosial masalah keterlantaran (Nasirin, 2010).

Meskipun demikian, memang dalam fakta empiris anak-anak terlantar sampai saat ini di Indonesia biasanya tersisih dari kehidupan normal, dengan demikian praktis juga terganggu dalam proses tumbuh kembangnya secara wajar. Hal yang lebih menyedihkan anak-anak terlantar tersebut sering menjadi korban situasi dan bahkan jauh dari masyarakat, yang berdampak pada perilaku dan kondisi emosional dari anak-anak yang bersangkutan. Karena itu dukungan dalam aspek emosional anak menjadi sangat penting, agar mereka mampu melakukan hubungan sosial secara wajar, upaya-upaya itu dapat dilakukan melalui pendidikan dengan segala aspeknya.

Dalam konteks pembangunan nasional, program kesejahteraan sosial tentu saja harus dirancang untuk menjangkau kepentingan

masyarakat secara luas. Namun demikian target utamanya ialah masyarakat yang memerlukan layanan di bidang kesejahteraan sosial yang disebut dengan istilah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti masyarakat miskin, anak-anak jalanan, korban kekerasan dalam rumah tangga, kelompok lanjut usia yang terlantar dan anak-anak terlantar. Dengan demikian sesungguhnya masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang kompleks, karena bersifat multidimensi, mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu identitas tunggal yang secara langsung dapat merepresentasikan keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu representasi yang komprehensif dari suatu fakta empiris atau suatu keadaan sosial. Penentuan batasan substansi kesejahteraan masih menjadi perdebatan yang luas di kalangan akademisi maupun praktisi-praktisi yang bergumul dalam aktivitas sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan bidang yang luas termasuk di dalamnya ialah peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat. Selanjutnya dengan mengutip definisi kesejahteraan sosial yang dicetuskan dalam *Pre-Conference Working Committee for the 15th International Conference of social Welfare*, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya (Adi, 1994). Di dalamnya termasuk juga kebijakan pelayanan yang meliputi beberapa hal yang langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat seperti, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Konsep kesejahteraan sosial yang akan banyak diulas pada bab-bab selanjutnya ialah kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar yang berkaitan dengan hak-hak pendidikannya sesuai amanat undang-undang. Mengingat masalah tersebut bukanlah masalah yang sederhana, maka tentu berkaitan dengan banyak aspek, seperti berkaitan dengan kebijakan pemerintah, faktor-faktor penyebab keterlantaran, makna penting pendidikan bagi mereka dan sebagainya.

BAB V

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Manajemen sering disebut pengelolaan memiliki definisi yang cukup beragam, dan jumlah definisinya juga cukup banyak sebanyak para ahli yang mendefinisikannya. Terry dalam Indrajit dan Jokopranoto (2006) mendefinisikan manajemen sebagai berikut.

“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources.”

Schermerhorn (2010) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang terdiri dari beberapa fungsi. Selengkapnya sebagai berikut.

“Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the use of resources to accomplish performance goals.”

Dengan demikian manajemen merupakan proses aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu dilakukan melalui orang lain dan dukungan atau bantuan sumber daya lainnya. Sumber daya lain dimaksudkan sebagai sumber daya yang bersifat non insani yang meliputi anggaran, material, mesin dan metode. Meskipun demikian sumber insani atau sumber daya manusia tetap menjadi sumber daya yang terpenting dalam manajemen, karena manusia sebagai motor penggerak dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, sedangkan sumber daya lainnya hanyalah sebagai pelengkap semata-mata. Karena itu dalam perspektif manajemen pendidikan, sumber

daya manusia menjadi titik sumbu yang harus dibangun baik kualitas maupun kuantitasnya.

Robbin (2012) sependapat dengan Fayol, yang berpendapat bahwa setiap manajer mesti melakukan lima fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Selengkapnya sebagai berikut, “... *that all managers perform five functions: planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling.*”

Sementara itu menurut Stoner & Freeman (Usman, 2011) mendefinisikan manajemen sebagai seni melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang lain. Selengkapnya dinyatakan “*Management is the art of getting things done Tthrough other people*”. Jika ditelusuri definisi-definisi manajemen, maka secara umum dapat dikatakan manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya organisasi agar dapat mencapai tujuannya secara efektif.

Untuk mencapai gagasan yang utuh tentang manajemen pendidikan, tentu juga harus ditelusuri tentang pengertian pendidikan. Menurut perspektif Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, memberi definisi pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Sementara itu Bush & Coleman (Usman, 2011) mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai berikut. “*Educational management is a field of study and praktice concerned with the operation of educational organization*”.

Merujuk dari pengertian manajemen dan pengertian pendidikan tersebut maka dapat dirumuskan definisi manajemen pendidikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, mandiri dan akuntabel.

Manajemen pendidikan dapat juga diartikan sebagai seni dalam mengelola sumber daya pendidikan baik sumber daya insani maupun sumber daya non insani, dengan proses perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Dengan demikian ruang lingkup manajemen pendidikan atau substansi yang menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai proses meliputi; (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) penggerakan dan (4) pengawasan atau pengendalian.

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, yang diarahkan kepada tercapainya tujuan secara efektif dengan penggunaan sarana secara optimal. Dalam pengelolaan pendidikan sebuah perencanaan menjadi penting untuk; (1) menghasilkan rencana yang dapat dijadikan kerangka kerja dan pedoman penyelesaian, (2) menentukan proses yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, (3) dengan perencanaan setiap langkah dapat diukur atau dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dapat dicapai, (4) perencanaan dapat mencegah pemborosan uang, tenaga dan waktu, (5) mengeleminir kemungkinan terjadinya hambatan dalam implementasinya (Arikunto, 2008).

Perencanaan ini tentu saja segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak manajemen berkaitan dengan perencanaan pendidikan anak-anak terlantar. Pihak manajemen akan berkaitan dengan Dinas Sosial Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan dalam bidang tersebut.

Sementara itu pengorganisasian diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kerjasama antar manusia. Pengorganisasian dapat juga diartikan sebagai upaya penyatuan dan penghimpunan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah struktur organisasi (Arikunto, 2008). Dengan adanya pengorganisasian maka dapat diketahui batas-batas dan tanggung jawab antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya, sehingga dapat dirancang agar antar bagian dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Selain itu pengorganisasian juga bermanfaat untuk penugasan atau pembagian tugas secara jelas terhadap orang-orang dalam organisasi, sehingga jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya inefisiensi akibat terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan tanggung jawab antar anggota organisasi.

Pendapat senada dikemukakan oleh Husaini Usman yang menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan upaya penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Juga berarti sebagai perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan membawa ke arah tercapainya tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu kepada pihak tertentu, serta pendelegasian wewenang yang diperlukan, kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya (Usman, 2011).

Pengorganisasian juga akan dipahami sebagai upaya yang dilakukan pihak manajemen dalam penyatuan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi yang melaksanakan pendidikan anak terlantar sehingga dapat terlihat secara terstruktur bidang-bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing orang atau masing-masing pihak.

Penggerakan merupakan upaya memberikan motivasi, penjelasan, arahan serta bimbingan kepada seluruh anggota organisasi sebelum melaksanakan tugas atau dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Penggerakan sering juga memiliki makna yang sama dengan istilah motivasi. Motivasi dalam konteks ini dimaknai sebagai salah satu alat manajemen agar bawahan mau bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai dengan yang diharapkan. Pengetahuan tentang pola motivasi membantu para manajer memahami sikap kerja orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Penggerakan atau motivasi atau pengarahan dapat dilakukan oleh pimpinan maupun wakil-wakil yang ditunjuk dengan cara mengadakan orientasi sebelum seseorang memulai melaksanakan tugas-tugasnya. Juga diperlukan adanya penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan dan seandainya.

Fungsi manajemen yang keempat menurut Terry ialah pengawasan. Yang dimaksud pengawasan ialah usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan (Arikunto, 2008). Pengawasan diperlukan untuk mengetahui agar pekerjaan dilaksanakan tidak menyimpang dari perencanaan, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan secara efektif. Pengawasan tentu dimaksudkan terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan dari pendidikan anak-anak terlantar, sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari apa yang direncanakan.

BAB VI

KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI

Pendidikan dalam perspektif ekonomi merupakan investasi kapital manusia (*human capital investment*). Konsep ini berhubungan dengan biaya dan manfaat yang diperoleh melalui pendidikan. Makna penting dari investasi kapital manusia ialah bahwa proses pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan suatu investasi (Cohn, 1979).

Nilai modal manusia (*human capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (*labour intensive*), tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*Brain intensive*). Adam Smith pakar ekonomi klasik mengakui bahwa pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya ia mengatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada keunggulan intelegensi dan intelektual. Nilai modal manusia tentu saja berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dengan asumsi bahwa semakin baik dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin meningkat produktivitasnya, sehingga semakin meningkat pula penghasilan dan kesejahteraannya. Hal tersebut relevan dengan prinsip dasar pendekatan nilai modal manusia (*human capital*) yaitu adanya perbedaan penghasilan para pekerja adalah akibat dari perbedaan kualitas para pekerja yang bersangkutan. Untuk mengatasi ketimpangan penghasilan tersebut harus dilakukan melalui

pendidikan atau pelatihan untuk itulah diperlukan investasi baik bagi individu, organisasi, maupun negara.

Bagi sebuah bangsa, pengeluaran anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah dianggap sebagai investasi. Anggaran yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, di masa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan (*fprofit*) atau manfaat (*benefit*) baik dalam bentuk *financial* maupun *nonfinancial*. Dalam bentuk uang dapat diperoleh dalam bentuk balas jasa tenaga kerja yang produktif, dan dalam bentuk *nonfinancial* dapat berupa nilai-nilai seperti kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat dan lain-lain. Perspektif ini dapat dilihat dari aspek individu, masyarakat, maupun negara. Selanjutnya Cohn (1979) mengatakan bahwa dari segi teori ekonomi pendidikan khususnya pendekatan *human capital*, aspek pembiayaan dianggap sebagai bagian dari investasi yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Taraf produktivitas tersebut pada gilirannya memengaruhi taraf perolehan (*earning*) seseorang atau kelompok yang berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Investasi dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh negara dan individu, hal ini disebabkan oleh karena pendidikan merupakan semi *public goods*. Jika investasi pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada individu, maka seolah-olah pendidikan itu menjadi *private goods*, sehingga sangat mungkin akan terjadi komersialisasi pendidikan. Jika hal itu terjadi maka anak-anak jalanan, anak-anak terlantar akan pupus harapannya untuk memperoleh akses pendidikan. Sebaliknya pendidikan itu hanya sanggup dibeli oleh orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan semakin lebar antara kaya dan miskin. Kesenjangan dalam bidang pendidikan dapat berdampak pada kesenjangan produktivitas, yang berdampak pada kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan. Semua kesenjangan itu akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Sebaliknya jika investasi pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada negara, maka pendidikan menjadi *public goods*, sehingga semua orang mempunyai hak dan kebebasan untuk memperoleh akses pendidikan tanpa ada kontrol dari pemerintah. Jika hal ini terjadi dalam dunia

pendidikan maka dikhawatirkan pendidikan menjadi tidak bermutu, karena tidak ada lagi kompetisi untuk memperoleh layanan pendidikan yang terbaik, dan tidak adanya tanggung jawab moral dari masyarakat untuk hal tersebut.

Pendidikan sebagai investasi dapat memberi manfaat baik kepada individu maupun masyarakat. (Cohn, 1979). Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang atau pun jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi secara umum, karena manusia juga dianggap sebagai entitas yang nilainya bisa berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, keahlian dan ketrampilan. Semua yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan juga latihan sebagai investasi. Manfaat yang diperoleh dari investasi tersebut bagi individu, tentu saja berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilannya. Dengan pengetahuan dan ketrampilan yang meningkat berarti pula meningkatkan produktivitas. Sebagai konsekuensi dari produktivitas yang meningkat, maka individu akan memperoleh promosi yang lebih baik, peningkatan penghasilan, yang semuanya itu niscaya berkorelasi dengan meningkatnya prestise yang bersangkutan juga terhadap peningkatan taraf hidup keluarga, jaminan kesehatan yang lebih baik dan sebagainya.

Selanjutnya Cohn menjelaskan bahwa, manfaat investasi pendidikan selain berdampak pada individu juga memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya yang lebih luas (*social return*). Manfaat secara sosial sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari adanya manfaat secara individu. Manakala individu telah menikmati hasil dari investasinya dalam bidang pendidikan berupa peningkatan penghasilan, maka secara logis dia juga akan memberi kontribusi terhadap penerimaan pajak, disebabkan oleh meningkatnya kewajiban membayar pajak. Selain itu sebuah bangsa dengan masyarakatnya sebagian besar berpendidikan tinggi, maka merupakan suatu keniscayaan akan berdampak pada kehidupan sosial yang lebih demokratis, lebih mengedepankan dialog daripada kekerasan dan sebagainya. Selain hal-hal tersebut, manfaat sosial dari investasi pendidikan ialah pertumbuhan ekonomi. Dengan

pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi maka akan meningkatkan produktivitas dan penghasilan, sehingga memberi dampak pada peningkatan ekonomi sebuah bangsa.

Gagasan Cohn tentang investasi pendidikan, sesungguhnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pada Ayat (2) mempertegas dengan prioritas yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Investasi pemerintah dalam bidang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar merupakan tahapan yang kritis dari sebuah proses pembentukan watak dan kualitas manusia Indonesia. Dengan demikian maka sangatlah logis untuk memprioritaskan pendidikan dasar dalam pembiayaan oleh pemerintah, jika tidak ingin negara kehilangan beberapa generasi, ketika baru muncul kesadaran untuk memperbaikinya. Selain itu pendidikan dasar merupakan segmen terbesar dari semua jenjang pendidikan yang mengalami banyak kendala dari faktor demografis, seperti terjadinya ledakan penduduk, faktor geografis karena kita negara kepulauan, tingginya angka putus sekolah karena kendala ekonomi, banyaknya anak-anak jalanan, meningkatnya angka anak-anak terlantar dari tahun ke tahun dan juga karena faktor budaya masyarakat setempat.

BAB VII

TEORI-TEORI PEMBEBASAN

A. TEORI HEGEMONI

Gramsci memulai teori hegemoninya dengan tiga batas konseptualisasi, dalam upayanya untuk memisahkan *political society* dengan *civil society*. Semua itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisasi hegemoni. Ketiga batasan tersebut adalah (1) ekonomi (*economy*), (2) negara (*political society*) dan (3) masyarakat sipil (*civil society*) (Bocock, 1986).

Batas konseptualisasi yang pertama yaitu ekonomi (*economy*), merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk mengartikan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan sosial produksi, yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas-kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi. Batas konseptualisasi yang kedua ialah negara (*political society*), merupakan batas yang berarti tempat munculnya praktik-praktik kekerasan (polisi dan aparat kekerasan lainnya) dan tempat terjadinya pendirian birokrasi negara. Birokrasi negara dalam konteks ini oleh Gramsci diidentikkan sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan dan institusi pendidikan. Batas konseptualisasi yang ketiga yaitu masyarakat sipil (*civil society*), yaitu batasan yang menunjuk pada organisasi lain di luar negara sebagai sebuah formasi sosial, dan di luar sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Sebagai komponen utama masyarakat sipil menurut Gramsci dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi *religious*.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ketiganya haruslah memiliki garis demarkasi yang jelas. Meskipun demikian pada tataran analisis dan empiris sering terjadi beberapa bagian organisasi atau institusi mungkin berada dalam sebuah batas, dua batas, bahkan bisa jadi muncul dalam ketiga batas tersebut. Asumsi yang dibangun dalam memisahkan batasan tersebut adalah dalam rangka memudahkan konstruksi teori sosial yang akan berimplikasi dalam bentuk-bentuk aksi sosial, aksipolitik, aksi ekonomi, aktivitas legal, pendidikan, aktivitas kebudayaan, aktivitas religious dan sebagainya (Bocock, 1986).

Relevansi teori ini ialah berkaitan dengan terjadinya praktik-praktik hegemoni institusi negara (*political society*) dalam memberikan layanan pendidikan, baik pendidikan pada umumnya maupun pendidikan yang khusus untuk anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak-anak jalanan, maupun anak-anak terlantar. Sedangkan disisi lain hak pendidikan bagi anak-anak terlantar maupun anak-anak jalanan merupakan amanat Undang-Undang Dasar. Tidak tertutup kemungkinan praktik hegemoni terhadap layanan pendidikan juga terjadi pada batas konseptualisasi yang lain selain negara, seperti pada batas konseptualisasi ekonomi maupun pada masyarakat sipil (*civil society*). Manusia mesti terbebas dari segala bentuk hegemoni agar bisa memperoleh haknya menikmati pendidikan, dengan memperoleh pendidikan mereka memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam mempermudah hidup manusia, memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Seorang filsuf Sir Francis Bacon mengagumi ilmu pengetahuan dengan ucapannya yang terkenal yaitu *knowledge is power* (pengetahuan adalah kuasa). Yang dimaksud Bacon bukan berarti lewat pengetahuan indrawi kita bisa menguasai segalanya, melainkan bahwa pengetahuan indrawi itu bersifat fungsional, dapat dipergunakan untuk memajukan kehidupan manusia. Kuasa kemudian dipahami sebagai kuasa atas alam yang dia sebut dengan *natura non nisi parendo vincitur* (alam hanya dapat ditaklukkan dengan cara mematumhinya). Bahwa alam hanya bisa dikuasai oleh pikiran kalau pikiran mematumhinya dengan cara memahami hukum-hukumnya, mempelajari sifat-sifat universalnya dan perkecualian-perkecualiannya. Dengan menaklukkan alam Bacon percaya umat manusia akan menjadi sejahtera melalui ilmu pengetahuannya (Hardiman, 2011).

B. TEORI KEKUASAAN/PENGETAHUAN

Foucault sebagai filsuf dan pemikir politik mengawali gagasannya dengan membalik cara pandang umum pola hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Pada umumnya orang beranggapan bahwa pengetahuan memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan itu. Foucault mengatakan pengetahuan adalah kekuasaan untuk menguasai yang lain, kekuasaan untuk mendefinisikan yang lain, sehingga pengetahuan tidak lagi membebaskan dan menjadi model pengawasan, peraturan dan disiplin. Foucault lebih memusatkan perhatian pada kekuasaan mikro yang dijalankan di tingkat kehidupan sehari-hari, dan tidak percaya kelas. Baginya tidak ada sumber tunggal yang menjadi asal muasal kekuasaan. Kekuasaan adalah sesuatu yang tersebar, dan konflik bersifat spesifik, khas menurut wilayah kebudayaan dan teknologi yang relevan.

Foucault mengkritik pandangan arus utama tentang kekuasaan. Kekuasaan bukanlah milik yang bisa dikuasai dan digunakan oleh kelas tertentu untuk mendominasi dan menindas kelas yang lain seperti pendapat Marx. Tidak juga seperti yang dikemukakan Weber yaitu sebagai kemampuan subjektif untuk mempengaruhi dan mendominasi orang lain. Kekuasaan tidak hanya berada di tangan para penguasa struktur-struktur yang ada pada negara, perusahaan maupun organisasi religius (Mahfud, 2009). Dalam masyarakat tentu saja ada pihak yang di atas dan di bawah, di pusat dan di pinggir, di dalam dan di luar. Tetapi bukanlah secara langsung dapat diartikan bahwa kekuasaan itu pasti ada di atas, di pusat dan di dalam. Tetapi kekuasaan itu bersifat menyebar dan berada di mana-mana. Kekuasaan merasuki seluruh bidang kehidupan masyarakat modern. Kekuasaan tidak selalu negatif, kekuasaan dapat beroperasi secara positif dan produktif (Mahfud, 2009).

Teori relasi kekuasaan dan pengetahuan Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan terdistribusi dalam relasi-relasi sosial dan tidak dapat direduksi ke dalam bentuk-bentuk dan penentu ekonomi yang terpusat, atau pada karakter legalnya. Kekuasaan tidak hanya represif tetapi juga produktif. Kekuasaan memunculkan subjek-subjek kekuasaan yang berperan dalam melahirkan kekuatan, membuatnya tumbuh dan memberinya tatanan. Foucault menyusun konsep tentang sebuah relasi setara yang saling membentuk antara kekuasaan dengan

pengetahuan sehingga menjadi tak terpisahkan dari rezim-rezim kekuasaan. Pengetahuan terbentuk dalam praktik-praktik kekuasaan dan turut berperan dalam pembentukan, perbaikan, dan perawatan teknik-teknik baru kekuasaan. Jika umumnya kekuasaan hanya tertuju pada negara dan kelas elit, gagasan Foucault membuka kemungkinan untuk membongkar semua dominasi dan relasi kekuasaan, seperti kekuasaan dalam pengetahuan antara para pencipta diskursus, birokrat, akademisi, dan rakyat miskin jelata yang tidak beradab yang harus didisiplinkan, diregulasi dan dibina (Fakih, 2003).

Lebih lanjut Foucault mengusulkan subjek diciptakan di dalam dan melalui wacana dan praktik diskursif, subjek dimaksud adalah subjek diri pencerahan. Konsep pencerahan tentang manusia sebagai subjek manusia otonom, menentukan dirinya sendiri dan sebagai hasil sejarah diciptakan oleh wacana. Wacana adalah suatu bentuk penuturan verbal yang berkaitan erat dengan kepentingan si penutur, sehingga dapat merupakan suatu akumulasi konsep ideologis yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan. Selanjutnya Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukanlah milik, melainkan strategi. Kekuasaan dapat digunakan dan dijalankan melalui jaringan seperti organisasi. Tidak hanya individu yang memutar kekuasaan ini diantara mereka, karena mereka selalu berada dalam posisi yang secara serentak menjalankan dan melakukannya, mereka tidak hanya menjadi target, tetapi juga elemen-elemen artikulasinya (Foucault, 2002).

Dengan demikian pada dasarnya penciptaan ruang untuk akses pendidikan bagi anak-anak terlantar merupakan suatu strategi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat disadari bahwa kekuasaan pengetahuan yang berada pada pemerintah bukanlah milik baginya, tetapi sebuah strategi untuk mendistribusi pengetahuan dan kuasa tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pendidikan tentu saja distribusi tersebut tidak saja terbatas pada masyarakat dari kalangan mampu dari segi ekonomi, tetapi juga terdistribusi kepada masyarakat yang selama ini termarginalkan seperti masyarakat miskin, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Seperti gagasan Foucault juga dengan tegas menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat refresif tetapi juga bersifat produktif, dengan demikian sungguh menjadi

sesuatu yang indah bila gagasan ini menjadi praktik nyata dalam membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang menunjukkan keberpihakannya kepada kaum marginal seperti anak-anak jalanan dan anak-anak terlantar, agar kekuasaan yang diembannya tidak menjadi represif.

Sesungguhnya teori kuasa pengetahuan oleh Foucault ini sejalan dengan teori pendidikan yang membebaskan oleh Paulo Freire. Mengingat penekanannya yang sama pada aspek keberpihakan pada kaum lemah dan marginal. Jika Paulo Freire sangat konsen terhadap pendidikan kaum tertindas, maka Foucault memihak pada kaum marginal yang tidak memiliki pengetahuan dan kuasa, sehingga pengetahuan dan kuasa harus terdistribusi ke seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya berada pada elit kekuasaan.

C. TEORI PRAKTIK SOSIAL

Teori praktik sosial yang dikembangkan Bourdieu ialah teori reproduksi kelas, yang berasumsi bahwa satu generasi dari suatu kelas memastikan bahwa ia akan mereproduksi dirinya dan meninggalkan hak istimewanya kepada generasi berikutnya (Mahfud, 2009). Misalnya diberi contoh tentang pendidikan, agar sebuah komunitas sukses dalam pendidikan, maka dibutuhkan keseluruhan rangkaian dari perilaku kultural dari komunitas tersebut. Sebuah keluarga dengan kelas menengah ke atas akan mereproduksi perilaku sosialnya kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak tersebut dapat berhasil dalam sistem pendidikan dan sekaligus mereproduksi kedudukan sosialnya, sedangkan anak-anak yang berasal dari kelas marginal tidak memperoleh hal itu.

Pierre Felix Bourdieu sebagai penggagas teori praktik sosial menjelaskan bahwa praktik sosial bertalian erat dengan *habitus*, *modal* dan *ranah*. *Habitus* diartikan oleh Bourdieu sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah, yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. *Habitus* merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Dalam proses perolehan keterampilan itu, struktur-struktur yang dibentuk berubah menjadi struktur-struktur yang membentuk,

misalnya seorang guru baru bisa melakukan pengajaran dengan improvisasi jika melatih diri secara terus menerus, sehingga menguasai betul bagaimana cara mengajar yang baik. *Habitus* ini kemudian menjadi dasar kepribadian individu. Jika *habitus* dibahas secara mendalam, mengandaikan suatu bentuk epistemologi sejarah dalam arti mengungkap relevansi praktis suatu wacana (Bourdieu, 2009). Konsep ini menjamin koherensi hubungan konsepsi masyarakat dan pelaku. *Habitus* menjadi perantara antara individu dan kolektivitas. *Habitus* memungkinkan dibangunnya teori produksi sosial pelaku dan logika tindakan. *Habitus* merupakan faktor penjelasan logika berfungsinya masyarakat. Keseragaman *habitus* dalam suatu kelompok menjadi dasar perbedaan gaya hidup dalam suatu masyarakat. Gaya hidup menurut Bourdieu dipahami sebagai keseluruhan selera, kepercayaan dan praktik sistematis yang menjadi ciri suatu kelas. Gaya hidup tersebut termasuk di dalamnya opini politik, keyakinan filosofis, keyakinan moral, selera estetis dan juga makanan, pakaian, dan budaya.

Ranah (field) menurut Bourdieu lebih bersifat relasional daripada struktural. Keberadaan hubungan ini terlepas dari kemauan dan kesadaran individu. *Ranah* bukanlah interaksi atau ikatan, *ranah* bukan hubungan inter subjektif antar individu. Bourdieu melihat *ranah* sebagai sebuah pertarungan, dan juga sebagai medan perjuangan. Struktur lingkungan yang menyiapkan dan membimbing strategi yang digunakan penghuni posisi tertentu baik individu maupun kolektif yang mencoba melindungi atau meningkatkan posisi mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. Selanjutnya Bourdieu menjelaskan bahwa *ranah* merupakan metafora untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya. Ruang sosial individu dikaitkan melalui waktu dengan serangkaian *ranah* tempat orang-orang berebut berbagai bentuk modal. Dalam ruang sosial ini individu dengan *habitusnya* berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial yang menghasilkan tindakan-tindakan sesuai dengan *ranah* dan *modal* yang dimiliki. *Ranah* merupakan medan perjuangan bagi anak-anak terlantar untuk memperoleh modal sosial berupa ilmu pengetahuan melalui akses pendidikan sehingga nantinya mampu membangun relasi-relasi sosial dengan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya *Modal* dipahami sebagai suatu visi pemetaan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat dengan mendasarkan pada logika, posisi-posisi dan kepemilikan sumber daya. Pemetaan ini lebih berupa suatu lingkup pembedaan atas dasar kepemilikan *modal* dan komposisi *modal* tersebut. Pendekatan ini memperhitungkan bahwa setiap klas sosial tidak dapat didefinisikan secara terpisah, tetapi selalu dalam hubungan dengan klas-klas lain. Selanjutnya modal dijelaskan sebagai hubungan sosial dalam arti suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan tempat mereka memproduksi dan mereproduksi. Setiap kepemilikan yang terkait dengan klas menerima nilainya dan efektivitasnya dari hukum-hukum khas setiap arena.

Selanjutnya Bourdieu menggolongkan *modal* menjadi empat jenis yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik. Modal ekonomi mencakup alat-alat produksi, materi dan uang yang dengan mudah digunakan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Modal budaya antara lain mencakup kemampuan menampilkan diri di depan publik, pemilikan benda-benda budaya yang bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, termasuk gelar keserjanaan. Modal sosial yang merujuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku baik secara individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Modal simbolik yaitu bertalian dengan segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi (Bourdieu, 2009).

Keseluruhan dari jenis modal tersebut baik modal ekonomi, modal budaya, modal sosial maupun modal simbolik memungkinkan untuk membentuk struktur sosial. Di antara berbagai macam modal tersebut, modal ekonomi dan modal budaya merupakan modal yang menentukan di dalam memberi kriteria diferensiasi yang paling relevan bagi lingkup masyarakat yang sudah maju. Berdasarkan dua pembedaan tersebut dapat dijelaskan kelas sosial terkait dengan katagori sosio profesional. Kelas sosial ini ada tiga kelompok yaitu kelas dominan, kelas kaum borjuasi kecil, dan kelas populer. Kelas dominan mengakumulasi berbagai modal sedangkan kelas borjuasi kecil tergolong posisi menengah yang berjuang mengumpulkan status simbolis berdasarkan peniruan pada budaya kelas dominan, hal itu dilakukan sebagai upayanya memenuhi keinginan menaiki tangga sosial. Kelas populer ditandai dengan hampir tiadanya kepemilikan keempat jenis modal tersebut, nilai yang menyatukannya ialah

sejumlah praktik dan representasi yang menemukan makna dalam keunggulan fisik dan penerimaan dominasi (Mahfud, 2009).

Selain teori praktik sosial yang berlandaskan *habitus, modal* dan *ranah*, Bourdieu juga menjelaskan *doxa* yang tampil melalui pengetahuan-pengetahuan yang begitu saja diterima sesuai dengan *habitus* dan *ranah* individu tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal itu merupakan aturan yang tidak terucapkan dalam setiap *ranah*. Aturan tersebut bekerja sebagai modus yang disebut oleh Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Dengan konsep *doxa* ini Bourdieu ingin memperlihatkan bentuk yang tersembunyi dalam kegiatan sehari-hari. Kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang sangat halus, kekerasan yang dikenakan pada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi, sebaliknya malah mengundang konfirmatas, sebab sudah mendapat legitimasi sosial disebabkan oleh bentuknya yang sangat halus. Bahasa, makna dan sistem simbolik para pemilik kekuasaan ditanamkan dalam benak individu-individu lewat suatu mekanisme yang tersembunyi dari kesadaran (Bourdieu, 2009).

Dalam realitas sosial individu tetaplah sebagai subjek, dalam arti bahwa individu tetap memiliki otonomi di dalam dirinya. Individu bukanlah semata-mata produk sosial yang tidak mampu memberikan sanggahan atau pertimbangan pribadi terhadap pengaruh sosial sebagai struktur objektif. Hal ini dapat menjelaskan, mengapa ada individu yang memiliki banyak pilihan sehingga dapat tampil sebagai orang yang bebas, dan ada individu yang tidak punya pilihan, terikat oleh realitas sosial yang melingkupinya

Teori praktik sosial akan dapat digunakan untuk melihat fenomena pendidikan anak terlantar yang dapat digolongkan sebagai kelas populer, yaitu kelompok yang tidak berdaya karena sama sekali tidak memiliki modal baik modal ekonomi, modal budaya, modal sosial maupun modal simbolik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kelompok marginal ini mengalami kekerasan simbolik yang terus-menerus terjadi di luar kesadaran mereka. Dari aspek manajemen pendidikan kelompok marginal ini haruslah terjangkau oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemegang kekuasaan, guna memutus lingkaran kemiskinan dan kebodohan.

BAB VIII

FAKTOR PENYEBAB FENOMENA ANAK TERLANTAR

A. KONDISI GEOGRAFIS

Fenomena anak terlantar disebabkan berbagai faktor, di antaranya yakni dari kondisi geografis suatu daerah. Seperti yang terjadi di Nusa Tenggara, di mana kondisi geografis daerahnya sangat dipengaruhi oleh angin muson, yang berimplikasi pada penghasilan mereka. Potensi tangkapan ikan terbesar justru terjadi pada saat musim angin timur, dengan suhu permukaan laut (SPL) rendah dan konsentrasi klorofil-a yang tinggi pada bulan Juli sampai bulan September. Angin timur menyebabkan *upwelling* di sepanjang pantai selatan, menyebabkan nutrient naik ke permukaan laut dari kedalaman sekitar 50 meter, sehingga menyebabkan tingginya konsentrasi klorofil-a. Seiring berubahnya musim dari musim angin timur menuju musim angin barat, maka tangkapan ikan nelayan juga menurun. Hal itu terjadi karena pada musim angin barat suhu permukaan laut (SPL) meningkat sehingga konsentrasi klorofil-a menurun, kondisi ini akan terjadi sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAN TENAGA KERJA

Jika dicermati angka sebaran penduduk secara teoritis dapat berdampak positif dan juga berdampak negatif. Berdampak positif bilamana jumlah penduduk yang besar dengan kualitas tinggi maka akan menjadi kunci utama kemajuan daerah bersangkutan.

Sebaliknya jika penduduk besar namun kualitas rendah maka dapat menjadi beban bagi cita-cita untuk mencapai kemajuan daerah tersebut. Hal ini tampak jelas bahwa penduduk besar seperti Kabupaten Lombok Timur, yang komposisi penduduknya lebih banyak pemuda ternyata memang merupakan beban bagi daerah tersebut, karena penduduk yang besar tersebut secara umum berpendidikan rendah, bahkan sebagian besar tidak bersekolah, dengan demikian dapat dikategorikan sumber daya manusianya sebagian besar kualitasnya rendah.

Kondisi penduduk dengan mayoritas anak muda, dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi manajemen pengelola pemerintahan di daerah. Menjadi potensi karena jumlah penduduk terbanyak berada pada usia muda, penduduk di usia tersebut merupakan tenaga kerja produktif, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan ekonomi daerah. Sebaliknya juga dapat berupa ancaman, karena penduduk usia produktif jika tidak memperoleh lapangan pekerjaan, maka dapat menimbulkan masalah sosial berupa pengangguran dan keterlantaran.

Seperti yang terjadi di NTB, dalam data tampak jelas bahwa penduduk Nusa Tenggara Barat yang mencari pekerjaan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional mencapai 119.143 orang. Dari jumlah tersebut berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2010 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 45.981 orang, terdiri dari 26.173 laki-laki dan 19.908 perempuan. Sedangkan yang telah mendapatkan pekerjaan sebanyak 31.206 orang yang didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 23.549 orang atau 75,46 persen. Data ini memberikan fakta secara objektif bahwa sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih rendah dari segi kualitas. Untuk memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tentu saja merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan memberi prioritas pada sektor pendidikan, agar memberi dampak nyata dalam menanggulangi masalah tersebut.

Dengan penduduk pencari kerja yang sebagian besar tamat Sekolah Dasar, ironisnya penduduk pencari kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup banyak yang mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI. Jumlah TKI yang terdaftar hingga tahun 2010 telah

mencapai angka 56.150 orang, dengan komposisi 66,62 persen laki-laki. Bidang pekerjaan yang digeluti di luar negeri ialah pekerjaan berladang dan pembantu rumah tangga. Data tahun 2010 menunjukkan pekerjaan terbanyak yang digeluti ialah pekerjaan berladang sebanyak 36.988 orang, sedangkan yang menggeluti pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga sebanyak 17.693 orang.

Banyaknya penduduk yang menjadi TKI dengan tingkat pendidikan yang rendah, disertai dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang melingkupinya, seperti tiadanya lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri, faktor kemiskinan dan sebagainya. Secara empiris kondisi demikian telah menimbulkan masalah-masalah sosial berikutnya antara lain bertambahnya anak-anak terlantar yang tidak tersentuh oleh layanan pendidikan.

C. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Jika dicermati dari aspek Produk Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya dalam menciptakan nilai tambah. Selain itu Produk Domestik Regional Bruto juga dapat merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan seluruh aktivitas perekonomian disuatu daerah.

Ada banyak penyumbang pertumbuhan perekonomian. Sebagai contoh di NTB, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonominya yakni sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tentu saja kehidupan sosial juga meningkat seperti pendidikan dan lainnya. Pendidikan dan ekonomi sepertinya memiliki kaitan yang bersifat timbal balik, jika pendidikan masyarakat semakin baik dapat memberi dampak pada pendapatan yang semakin baik, demikian sebaliknya perekonomian yang semakin baik akan memberi kontribusi terhadap tingkat pendidikan yang semakin baik.

Ditinjau dari perspektif pengeluaran, pertumbuhan perekonomian mayoritas masyarakat Indonesia masih dominan digerakkan oleh komponen konsumsi masyarakat. Selain itu pembentukan modal tetap bruto memberi kontribusi yang sangat kecil dibandingkan dengan faktor konsumsi. Hal itu berarti bahwa pendapatan masyarakat masih sangat rendah, sehingga tidak ada sisa

uang untuk menabung atau investasi, dan penghasilan masyarakat hanya habis untuk konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kondisi yang demikian maka berarti kehidupan sosial masyarakat juga mengalami banyak hambatan, seperti kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi anak-anak dan sebagainya.

D. PARIWISATA

Banyak potensi pariwisata pada kawasan milik pemerintah daerah masih memerlukan sentuhan dalam sebuah perencanaan strategis. Di antaranya dapat melalui terobosan-terobosan inovatif, guna percepatan pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya pembangunan pariwisata diharapkan terjadi kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakatnya. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang bermuara pada kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga mengurangi terjadinya anak-anak terlantar, anak jalanan dan sebagainya.

E. PENDIDIKAN

Pemerintah Daerah harus memberikan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagaimana juga dinyatakan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 bahwa, pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan tentu saja juga pendidikan menengah yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa (Kemendiknas, 2010-2014).

Secara normatif, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Seperti yang terjadi di NTB, yang tampak jelas pada Angka Partisipasi Murni (APM) yang mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI tahun 2008/2009 mencapai angka 98,40 persen. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan cukup berarti.

Sementara itu dalam fakta yang lain juga ditemukan masih banyak anak-anak yang mengalami putus sekolah, bahkan tidak bersekolah sama sekali seperti anak-anak terlantar, anak jalanan, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua mereka dan sebagainya. Fakta ini sungguh sesuatu yang sangat ironis di tengah-tengah gencarnya pemerintah dalam pelaksanaan wajib belajar tingkat pendidikan dasar atau wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, bukan berarti pemerintah berdiam diri, di Nusa Tenggara Barat contohnya, Pemerintah Provinsi mencanangkan program angka buta aksara nol dan program angka *drop out* nol, meskipun belum efektif dalam implementasinya.

Berkat program pemberantasan buta aksara oleh pemerintah, baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun yang dibiayai oleh pemerintah daerah maka angka buta aksara di beberapa provinsi mengalami penurunan dari tahun ke tahun termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian jika ditinjau dari rata-rata lama sekolah, untuk rata-rata nasional sudah mencapai 7,8 tahun untuk laki-laki dan 6,7 tahun untuk perempuan.

F. KESEHATAN

Setelah indikator pendidikan terutama yang berkaitan dengan angka buta aksara yang masih terhitung tinggi dan rata-rata lama sekolah yang masih terhitung rendah juga masih ada masalah kesehatan, terutama masalah kematian bayi dan balita yang masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Hal ini berarti, derajat kesehatan masyarakat masih rendah. Fakta angka kematian bayi yang tinggi itu terkait dengan kesadaran masyarakat, kebersihan, dan semuanya juga bermuara pada pendidikan masyarakat, karena pendidikan memberi implikasi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kebersihan, kesehatan dan sebagainya.

Dari segi perawatan kesehatan pasca melahirkan, sebagian bayi yang mengalami gangguan kesehatan tidak dibawa berobat ke sarana kesehatan yang ada, dan masyarakat cenderung mengandalkan perawatan secara tradisional di rumah tanpa memeriksakan bayinya ke Puskesmas atau Polindes. Selain beberapa faktor tersebut, berat badan bayi lahir yang rendah yaitu kurang dari 2.500gram adalah

salah satu faktor yang cukup menonjol sebagai penyebab kematian bayi. Hal ini terjadi akibat gizi buruk, anemia, malaria dan penyakit menular seksual sebelum atau ketika hamil.

Selain angka kematian bayi, indikator kesehatan masyarakat juga ditentukan oleh angka kematian ibu melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan adalah jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Secara nasional berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia, angka kematian ibu Indonesia sebesar 307/100.000 kelahiran hidup.

Penyebab utama kematian ibu melahirkan disebabkan oleh terjadinya pendarahan. Sedangkan penyebab lainnya bisa disebabkan oleh penyakit kronis yang menyertai kehamilan, nutrisi yang jelek, anemia, terlalu muda hamil, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak kelahiran, terlalu tua melahirkan. Selain itu faktor penyebab lainnya ialah karena perilaku masyarakat yang belum mem praktikkan pola hidup sehat sebagai pengaruh budaya atau tradisi, pendidikan yang relatif rendah, akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memadai.

Gambaran umum tentang kesehatan ini menjadi relevan untuk dikemukakan mengingat mempunyai keterkaitan dengan rendahnya pendidikan masyarakat, selain itu rendahnya kesehatan masyarakat yang terindikasi dari tingginya angka kematian ibu melahirkan juga berimplikasi terhadap tingginya anak-anak yang menjadi kehilangan kasih sayang ibu, bahkan tidak tertutup kemungkinan hal itu juga dapat menjadi penyebab anak-anak terlantar.

G. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan bergantung pada dua faktor utama yaitu tingkat pendapatan daerah rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Faktor kemiskinan dapat menjadi kendala pada banyak aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa kasus. Kemiskinan juga sebagai salah satu pemicu banyaknya anak-anak menjadi anak jalanan mencari nafkah sekedar untuk mempertahankan hidup. Kemiskinan itu juga sebagai salah satu pemicu banyaknya anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya sehingga tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak.

Posisi penduduk miskin Indonesia menurut data terakhir 2011 berdasarkan rata-rata nasional mencapai 12,49%. Kondisi tersebut tentu saja dapat digunakan sebagai pemicu untuk memperkuat semangat bersama masyarakat dalam upayanya menanggulangi kemiskinan. Masalah kemiskinan di dalamnya tercakup dimensi pendidikan, kesehatan, perumahan, ekonomi dan infrastruktur.

Selain masalah kemiskinan, juga ada masalah dengan tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Artinya, Pemerintah Provinsi memerlukan rencana-rencana strategis untuk memberi pelayanan secara optimal guna mengentaskan anak-anak terlantar dari ketidak-berdayaan dalam mengakses pendidikan. Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah selayaknya juga menyentuh kelompok masyarakat marginal, karena program tersebut diperuntukkan bagi semua warga negara di Indonesia. Justru akan menjadi sangat ironis, ketika pemerintah disatu sisi menggalakkan program wajib belajar khususnya pada jenjang pendidikan dasar, disisi yang lain banyak sekali kelompok masyarakat yang tidak mampu memperoleh akses pendidikan, seperti anak-anak terlantar.

Permasalahan anak terlantar memang merupakan permasalahan yang kompleks. Untuk memahami terjadinya keterlantaran anak juga harus memahami akar keterlantaran tersebut, agar dapat secara mendalam mengenali sebab dari persoalan yang sebenarnya, sehingga lebih memudahkan untuk memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalahnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rekomendasi yang dibuat berdasarkan analisis yang mendalam akan diperlukan oleh para pengambil kebijakan, sebagai basis untuk membuat perencanaan dalam menanggulangi masalah-masalah keterlantaran anak yang umumnya juga sangat beragam.

Fenomena anak-anak terlantar di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat. Di setiap persimpangan jalan, di pasar tradisional, di terminal, di pelabuhan, bahkan sekarang di tempat-tempat orang membangun ruko dengan mudah kita menemukan anak-anak usia sekolah sedang mengais rejeki untuk mempertahankan hidup mereka. Memiliki sebutan sebagai anak terlantar tentulah bukan merupakan pilihan mereka.

Berbagai sebab atau berbagai faktor yang memicu terjadinya anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat. Jika diidentifikasi maka dapat dikemukakan beberapa faktor sebagai penyebab anak-anak menjadi terlantar yaitu.

1. Faktor kemiskinan;
2. Faktor orang tua menjadi TKI/TKW;
3. Faktor perceraian orang tua;
4. Faktor meninggalnya salah satu atau kedua orang tua;
5. Faktor sengaja ditelantarkan;
6. Faktor orang tua sakit dalam waktu lama;
7. Faktor orang tua di penjara, dan;
8. Faktor kematian ibu melahirkan.

Dari semua faktor penyebab terjadinya fenomena anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat, seperti yang telah dikemukakan ternyata faktor kemiskinan merupakan faktor dominan, Faktor kemiskinan dapat memicu munculnya faktor-faktor yang lain, yang kemudian ikut memberi andil terhadap pertumbuhan anak-anak terlantar. Kemiskinan seolah-olah telah menjadi mata rantai yang menghubungkan kelompok masyarakat marginal dengan keterlantaran anak.

Suradi (2009) memastikan bahwa pada setiap rumah tangga miskin terdapat anak-anak yang mengalami keterlantaran. Selanjutnya menurut Suradi, bahwa pada keluarga miskin ada kecenderungan orang tua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit kehidupan mereka.

Kemiskinan merupakan *deprivation trap* atau jeratan kekurangan sebagaimana diungkapkan Robert Chambers dalam Achmad Fatony. Selanjutnya dijelaskan bahwa *deprivation trap* terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan orang miskin yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan dan (5) ketidakberdayaan. Kerentanan menyebabkan roda penggerak kemiskinan, yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga keluarga miskin tersebut masuk semakin dalam ke jurang kemiskinan. Selain itu ketidakberdayaan paling dominan mendorong terjadinya proses kemiskinan atau bahkan pemiskinan, karena dalam ketidakberdayaan dapat terjadi

eksploitasi dalam segala bentuknya. Bahkan eksploitasi bisa dalam bentuk pemerasan dari kelompok yang lebih kuat (Fatony, 2011).

Secara teoritis, kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan tidak terpenuhinya kebutuhan sosial (Wiinarno, 2011). Kemiskinan sebagai kekurangan materi digambarkan sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu kemiskinan dalam dimensi ini sering dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan kebutuhan material yang bersifat primer. Rendahnya penghasilan dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang masih berada pada garis kemiskinan. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan sosial dapat dipahami sebagai rendahnya kemampuan seseorang dalam memperoleh pelayanan sosial seperti; pendidikan, kesehatan, serta informasi. Ketiga dimensi kemiskinan tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat memproduksi keterlantaran pada anak-anak.

Masalah kemiskinan di Nusa Tenggara Barat memang merupakan masalah yang cukup krusial. Posisi penduduk miskin pada tahun 2011 mencapai angka 19,73%, angka yang cukup pantastis bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 12,49%. Jika ditelusuri lebih mendalam, maka masalah kemiskinan bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan suatu masalah yang kompleks. Berdasarkan tingkat kerentanan, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu; pertama kemiskinan kronis (*chronic poverty*) merupakan kemiskinan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, turun temurun, atau disebut juga kemiskinan struktural. Kedua kemiskinan sementara yaitu kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial, gempa bumi, tsunami dan sebagainya, yang bilamana tidak tertangani dengan baik dapat menjadi kemiskinan kronis (Hanifah, 2010).

Kemiskinan sebagai akar keterlantaran anak termasuk katagori kemiskinan yang kronis (*chronic poverty*) karena berlangsung secara turun temurun dan dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi kemiskinan struktural. Kemiskinan yang kronis ini memerlukan penanganan yang serius dan sungguh-sungguh secara lintas sektoral serta berkelanjutan. Penanganan kemiskinan secara lintas sektoral

diperlukan karena masalah kemiskinan tidak saja berurusan dengan masalah ekonomi semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat non ekonomi seperti masalah sosial budaya dan bahkan masalah politik. Abu Hanifah dan Suyanto (2010) menyitir pendapat Gunawan Sumodiningrat yang menyatakan bahwa ada beberapa dimensi yang menyertai kemiskinan yaitu: (1) Dimensi ekonomi, dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan atau perumahan, (2) Dimensi sosial dan budaya, dimensi ini menggunakan ukuran kualitatif, seperti misalnya lapisan masyarakat yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan ini dapat ditelusuri dari terlembaganya nilai-nilai seperti; apatis, apolitis, fatalistik serta ketidak-berdayaan. (3) Dimensi Struktural atau politik, dimensi ini berarti bahwa orang yang mengalami kemiskinan ekonomi, pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik, sehingga secara struktural menduduki struktur sosial yang paling bawah.

Berbagai dimensi kemiskinan tersebut, secara teoritis memberi dukungan bahwa sesungguhnya menangani masalah manusia khususnya yang termasuk kelompok-kelompok marginal seperti anak-anak terlantar, sudah sepatutnya tidak hanya memberi prioritas pada dimensi ekonomi saja seperti memberi makan, pakaian dan perumahan. Tetapi perlu memperhatikan dimensi-dimensi yang lain seperti dimensi sosial budaya serta dimensi struktural. Penanganan masyarakat miskin seperti anak-anak terlantar misalnya dilakukan dengan memberi ruang akses pendidikan, meskipun tidak mengabaikan dimensi ekonomi, dengan demikian dalam kurun waktu tertentu mereka bisa mengubah budaya kemiskinan dengan sikap proaktif mencari sumber-sumber penghidupan serta pada gilirannya dapat mengubah struktur sosial dirinya dalam masyarakat.

Penanganan kelompok masyarakat marginal seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tugas negara. Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu negara wajib melindungi dan memberikan bantuan agar mereka bisa berdaya dalam menjalani kehidupan sosialnya. Sumodiningrat dalam Habibullah (2010) menjelaskan bahwa ada beberapa katagori

kebijakan yang dapat dilakukan dalam menangani dan menanggulangi kemiskinan agar tidak secara berkelanjutan memproduksi anak-anak terlantar. Pertama, kebijakan perluasan kesempatan (*promoting opportunity*), hal ini berkaitan dengan penciptaan iklim dan lingkungan yang kondusif dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kedua, kebijakan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), kebijakan ini berkaitan dengan upaya penguatan masyarakat beserta organisasi dan kelebagaannya untuk mampu mengakses dan terlibat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik. Ketiga, kebijakan peningkatan kemampuan (*capacity building*), kebijakan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar. Keempat, kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.

Fenomena anak terlantar di Nusa Tenggara Barat juga mempunyai kaitan dengan banyaknya masyarakat yang mencari pekerjaan di luar negeri dengan menjadi TKI/TKW di Malaysia dan Arab Saudi. Tujuan baik mereka untuk mencari penghidupan di luar negeri, selain dapat membantu perekonomian keluarga disatu sisi, ternyata disisi yang lain menyisakan banyak kesedihan dan korban bagi anak-anak mereka. Kepergian ke luar negeri mencari pekerjaan dengan bermodal tenaga saja tanpa keterampilan yang memadai, didorong oleh kondisi di daerahnya sendiri yang sulit memperoleh pekerjaan. Sementara itu kehidupan harus terus berjalan, dengan janji orang-orang tertentu yang mengatakan dengan mudah dapat bekerja sebagai buruh perkebunan, sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, khususnya Malaysia dan Arab Saudi maka dengan berhutang untuk modal keberangkatan, mereka berangkat menjadi TKI/TKW. Dengan keberangkatan mereka dalam waktu lama, menimbulkan perceraian suami istri yang cukup tinggi. Anak-anak sebagai korban perceraian yang kemudian ditinggal oleh ibunya untuk menikah lagi, dan bapaknya juga menikah lagi, menjadi beban bagi kakek dan nenek mereka. Sementara itu kehidupan nenek dan kakek mereka juga

terhimpit kesulitan ekonomi, maka praktis anak-anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai anak, seperti sandang, pangan, papan lebih-lebih pendidikan. Keterlantaran anak-anak tersebut jika tidak memperoleh penanganan serius akan menciptakan lingkaran kemiskinan yang tidak pernah berakhir, secara terus menerus dan turun temurun, pada akhirnya siklus kemiskinan yang demikian dapat menciptakan kemiskinan struktural.

Migrasi penduduk lintas negara khususnya yang dilakukan TKI/TKW biasanya dilakukan karena faktor-faktor di dalam negerinya sendiri antara lain faktor kemiskinan. Indonesia termasuk salah satu negara yang memasok tenaga kerja tidak terampil (*unskill labors*) terbesar di kawasan Asia tenggara (Muchtar, 2010). Pada umumnya mereka kebanyakan perempuan yang bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga bagi kaum perempuan, dan pekerjaan sebagai buruh perkebunan merupakan fenomena umum bagi masyarakat Nusa tenggara Barat yang menjadi TKI/TKW khususnya di Malaysia. Menjadi TKI/TKW merupakan sumber penghasilan bagi ribuan warga NTB terutama yang berasal dari masyarakat marginal pedesaan dengan pendidikan rendah.

Selain itu faktor tingginya angka kematian ibu melahirkan juga menjadi pemicu timbulnya anak-anak terlantar. Data tahun 2010 menunjukkan angka kematian ibu melahirkan diseluruh kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat mencapai 113 kasus. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya derajat kesehatan masyarakat, yang juga berkaitan dengan faktor kemiskinan.

Dengan demikian sesungguhnya fenomena anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat yang disebabkan oleh banyak faktor seperti; faktor orang tua menjadi TKI/TKW, faktor perceraian orang tua, faktor meninggalnya salah satu atau kedua orang tua, faktor sengaja ditelantarkan, faktor orang tua sakit dalam waktu lama, faktor orang tua di penjara, dan faktor kematian ibu melahirkan, semua faktor tersebut berkaitan erat dengan faktor kemiskinan, sehingga faktor kemiskinan menjadi faktor dominan yang memproduksi generasi anak-anak terlantar secara turun temurun.

Fenomena keterlantaran anak yang terjadi secara turun-temurun sejalan dengan teori reproduksi kelas yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu salah seorang pemikir Prancis yang paling terkemuka akhir abad ke-20. Dalam teori reproduksi kelas dinyatakan

bahwa satu generasi dari suatu kelas memastikan bahwa ia mereproduksi dirinya dan meninggalkan hak istimewanya kepada generasi berikutnya (Mahfud, 2009). Salah satu contoh reproduksi kelas terjadi dalam dunia pendidikan. Keberhasilan dalam dunia pendidikan dipengaruhi oleh seluruh rangkaian perilaku kultural yang melatar-belakanginya. Anak-anak yang berasal dari kelas menengah dan kelas atas telah mempelajari perilaku kultural tersebut yang diwarisi dari orang tuanya atau lingkungan keluarganya, seperti; kebiasaan membaca, penggunaan media informasi seperti internet dan sebagainya. Perilaku demikian memberi pengaruh terhadap proses menempuh pendidikan di sekolah. Sementara itu anak-anak yang berasal dari kelas miskin, lebih-lebih anak-anak terlantar tidak dapat mewarisi perilaku kultural yang demikian dari lingkungan keluarganya maupun orang tuanya. Hal itu menyebabkan terjadi reproduksi kelas yang sama secara turun temurun. Teori reproduksi kelas dalam konteks keterlantaran anak di NTB ini, secara faktual juga terjadi. Hampir semua anak-anak terlantar yang ada, merupakan produk dari kelas masyarakat miskin, dan generasi ini akan memproduksi kelas yang sama, kepada generasi selanjutnya, jika tidak terjadi penanganan yang berarti oleh berbagai pihak, terutama pemerintah.

Teori reproduksi kelas sebagaimana dikembangkan oleh Bourdieu menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan bagi anak-anak terlantar. Dengan diberikannya kesempatan anak-anak terlantar untuk memperoleh pendidikan, maka anak-anak tersebut akan mampu memutus mata rantai reproduksi kelas yang sama terhadap generasi berikutnya, hal itu berarti mereka akan mereproduksi kelas yang telah diubah oleh dirinya melalui pendidikan. Hal tersebut akan berdampak tidak saja hanya bagi dirinya sendiri dan generasinya, tetapi juga akan berdampak terhadap kemajuan sebuah bangsa serta peradaban.

BAB IX

MANAJEMEN PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR

Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Usman, 2010). Kata manajemen juga sering diartikan sebagai pengelolaan, dan kata manajer diartikan sebagai orang yang melakukan pengelolaan. Pengelolaan pendidikan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat akan ditelaah dari perspektif manajemen dalam arti luas yang meliputi perencanaannya, pengorganisasian, pengarahan atau pengaktifan dan pengendalian.

Pendidikan anak-anak terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikelola oleh Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram. Dari segi kelembagaan Panti Sosial Asuhan Anak Harapan ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Panti Sosial tersebut mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Teknis Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial anak, berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan program kegiatan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, pelayanan pengganti anak dalam memenuhi kebutuhan antara lain; kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial, pengembangan bakat dan bimbingan keterampilan dan pematapan sikap sosial bagi anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu yang kemudian menjadi anak-anak terlantar agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Ditinjau dari proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengendalian pendidikan anak terlantar yang dikelola oleh Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram.

A. PERENCANAAN

Perencanaan (*planning*) untuk pendidikan anak-anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram merupakan kegiatan yang penting, karena selain perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, perencanaan juga dapat memberi arah ke mana organisasi akan bergerak. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, yang diarahkan kepada tercapainya tujuan dengan penggunaan sarana yang optimal (Arikunto, 2008). Berkaitan dengan makna dari perencanaan sebagaimana diungkapkan Suharsimi tersebut, Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram melakukan serangkaian pengambilan keputusan yang akan diimplementasikan pada tahun berikutnya yakni meliputi kegiatan yang dimulai dari seleksi calon anak asuh, penerimaan, pembinaan, penyaluran atau pengembalian hingga peninjauan alumni atau eks anak asuh yang telah kembali setelah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SMA/SMK, baik kembali kepada keluarganya maupun kembali ke masyarakat untuk bekerja dan melanjutkan kehidupan sosialnya secara mandiri.

Selanjutnya Suharsimi menjelaskan setidaknya ada lima alasan yang mendasari pentingnya sebuah perencanaan bagi suatu organisasi. Kelima alasan itu ialah; (1). Dalam upaya menghasilkan rencana yang dapat dijadikan kerangka kerja dan sebagai pedoman penyelesaiannya, (2). Perencanaan menghasilkan rencana untuk menentukan proses yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, (3). Dengan rencana, setiap langkah kegiatan dapat diukur atau dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai, (4) Rencana juga dapat mencegah pemborosan uang, tenaga, dan waktu, (5). Rencana yang matang dapat mempersempit terjadinya hambatan atau gangguan (Arikunto, 2008).

Sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sebuah program kerja selalu diawali dengan proses perencanaan. Demikian juga yang dilakukan oleh Panti Sosial Asuhan Anak harapan Mataram

yang khusus menangani pendidikan anak terlantar, setiap tahun selalu membuat perencanaan. Perencanaan tersebut diperlukan untuk memastikan program kerja apa saja yang dapat dilakukan untuk tahun berikutnya, selain juga untuk mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan. Louis A. Allen dalam Syahrizal Abbas (2009) menyebutkan perencanaan sebagai penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kegiatan Perencanaan pendidikan anak terlantar pada Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram, berjalan sebagai kegiatan rutin setiap tahun. Bahkan bersifat top down. Fakta tentang begitu banyaknya anak-anak terlantar yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat yang mencapai angka 205. 116 anak data tahun 2011 tidak menjadi pertimbangan yang serius, karena secara rutin dari tahun ke tahun sudah dapat dipastikan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram dalam mengelola pendidikan anak terlantar sebanyak 80 anak. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan tidak memilih berbagai alternatif, tidak juga menghubungkan berbagai fakta serta asumsi mengenai perkembangan anak-anak terlantar di masa datang. Jika ditelusuri secara konseptual, dapat kita katakan perencanaan pendidikan anak-anak terlantar pada Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram tidak sejalan dengan konsep Terry sebagaimana dirujuk oleh Syahrizal Abbas (2009) yang mengatakan perencanaan sebagai kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan menggunakan sejumlah asumsi mengenai masa datang dengan jalan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan yang dibuat setiap tahun berkaitan dengan formasi yang tersedia untuk menampung anak-anak terlantar usia sekolah baik tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Perencanaan yang menyangkut jumlah anak-anak terlantar yang akan diberikan layanan pendidikan sangat bergantung terhadap jumlah anak-anak dalam panti yang akan menamatkan sekolahnya pada jenjang SLTA dan sudah dipersiapkan untuk keluar dari panti, ditambah dengan anak-anak yang kembali kepada keluarganya karena ada perubahan situasi kondisi pada keluarga yang bersangkutan sehingga sudah siap untuk membina kembali anak-anak tersebut.

Dalam setiap tahunnya Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram direncanakan menampung anak-anak terlantar sebanyak 80 orang dari semua jenjang pendidikan dari tingkat SD sampai dengan SLTA. Namun demikian tidak berarti setiap tahun ada tambahan 80 orang anak terlantar dari 10 kabupaten/kota se-NTB yang akan tertampung dan memperoleh layanan pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal itu disebabkan oleh karena kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi, sehingga perencanaan tetap mengacu pada kemampuan pembiayaan yang terbatas 80 orang anak terlantar, tidak direncanakan sesuai dengan banyaknya anak-anak terlantar yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. Perencanaan semacam ini dalam teori perencanaan dapat dikategorikan sebagai teori advokasi yaitu teori perencanaan yang menekankan pada hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak berdasarkan pengalaman empiris atau penelitian, melainkan pada argumentasi yang logis, rasional dan dapat dipertahankan melalui argumentasi (advokasi) (Usman, 2010).

Selanjutnya Tanner dalam Husaini Usman menjelaskan ada beberapa teori perencanaan yang dipergunakan oleh berbagai lembaga atau institusi dalam merumuskan program-program kegiatan yang akan diimplementasikan dalam menjalankan roda organisasi. Beberapa teori perencanaan tersebut dijelaskan secara garis-garis besarnya saja, yang terdiri dari; teori sinoptik, teori inkremental, teori traksaktif, teori advokasi, dan teori radikal. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis, serta alternatif-alternatif rujukan dalam melakukan perencanaan, berikut ini gambaran secara singkat teori-teori perencanaan dimaksud.

Teori sinoptik, teori ini disebut juga *system planning* atau *rational comprehensive planning*. Dalam melakukan perencanaan dengan pendekatan teori sinoptik, menggunakan model berpikir sistem. Sesuatu yang direncanakan dipandang sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh, kemudian dalam perencanaannya didekati dari berbagai bagian dengan menggunakan pendekatan sistem. Ada beberapa tahapan dalam perencanaan model sinoptik yaitu: (1). Pengenalan masalah, (2). Mengestimasi ruang lingkup problem, (3). Mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, (4). Menginvestigasi problem, (5). Memprediksi alternatif, (6). Mengevaluasi kemajuan

atas penyelesaian yang spesifik. Teori ini cukup lengkap, mengingat pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sistem.

Selanjutnya ialah teori inkremental, teori ini dalam perencanaan berdasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalianya, sehingga tampak sangat berhati-hati terhadap objek yang akan direncanakan. Jika sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada dan memberikan manfaat memadai barulah perencanaan dilakukan. Teori ini cocok untuk perencanaan yang bersifat desentralisasi, karena bergantung pada kemampuan lingkungan, tetapi kurang memadai untuk perencanaan jangka panjang.

Selain itu, dalam perencanaan juga dikenal adanya teori transaktif, yang menekankan pada hakikat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Keinginan-keinginan individu diteliti satu persatu sebelum perencanaan dimulai. Komunikasi antar individu dilakukan beberapa kali, ide-ide perencanaan dievolusikan secara hati-hati dan perlahan diantara personalia. Teori ini merupakan perencanaan yang terdesentralisasi, karena perencanaan sepenuhnya bergantung kebutuhan individu-individu di daerah atau di dalam organisasi. Perencanaan seperti ini cocok dilakukan oleh provinsi, kabupaten/kota atau organisasi sekolah.

Sedangkan teori perencanaan yang disebut teori advokasi menekankan pada hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak berdasarkan pengalaman empiris atau penelitian, melainkan berdasarkan pada argumentasi yang logis, rasional dan dapat dipertahankan melalui advokasi. Argumen-argumen yang logis seperti misalnya keterbatasan anggaran dan lain-lain cukup rasional digunakan sebagai dasar argumentatif dalam menyusun perencanaan bagi organisasi yang bersangkutan.

Teori perencanaan lainnya ialah teori radikal, yang menekankan pada kebebasan lembaga lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar lebih cepat memenuhi kebutuhan lokal. Penggabungan semua teori perencanaan tersebut disebut dengan teori SITAR (sinoptik, incremental, transaktif, advokasi dan radikal), yang sering disebut dengan istilah *complementary planning process*. Teori ini untuk menggabungkan semua kelebihan dari semua teori perencanaan yang ada (Usman, 2010).

Dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas menjadi kendala tersendiri dalam merencanakan untuk

mempercepat menuntaskan pendidikan bagi anak-anak terlantar, sehingga perencanaan yang ada bersifat rutin, tidak ada rencana-rencana yang merupakan perencanaan strategis, inovasi, ataupun terobosan-terobosan yang dapat dilakukan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram dalam memperluas akses bagi anak-anak terlantar se-Nusa Tenggara Barat yang demikian banyaknya.

Selain perencanaan yang meliputi formasi daya tampung, Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram juga merencanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan semua proses pelayanan pendidikan anak terlantar. Berdasarkan hasil observasi kegiatan-kegiatan tersebut meliputi beberapa hal yaitu; (1) pendekatan awal, (2) penerimaan/ seleksi (3) pelayanan/ penyantunan, (4) pembinaan, (5) rekonsiliasi, (6) pembinaan lanjut.

B. PENGORGANISASIAN

Dalam pengorganisasian (*organizing*) pendidikan anak terlantar pada Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram dapat kita lihat dari mulai perekrutan anak-anak terlantar dari 10 kabupaten/kota se NTB. Setelah perencanaan dilakukan maka dapat dipastikan jumlah formasi yang tersedia bagi anak-anak terlantar untuk ditampung di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram untuk diberikan layanan pendidikan dari tingkat SD sampai tingkat SLTA. Kepala Panti kemudian berkoordinasi dengan melibatkan semua Dinas Sosial Kabupaten Kota agar memberikan daftar anak-anak terlantar di wilayahnya masing-masing. Dalam proses memperoleh data anak-anak terlantar dari seluruh pelosok pedesaan para Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota selain memperoleh dukungan dari para pekerja sosial dari instansi bersangkutan juga melibatkan para pekerja sosial masyarakat yang ada di wilayah masing-masing, juga melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mensosialisasikan program pendidikan bagi anak-anak terlantar melalui Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram yang dibiayai oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data anak-anak terlantar yang diajukan oleh Dinas Sosial seluruh kabupaten/kota kemudian diinventarisir pada Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram untuk diverifikasi dan dilakukan seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Kepala Panti. Pengorganisasian ini merupakan usaha untuk mewujudkan kerjasama

antar manusia yang terlibat (Arikunto, 2008). Pengorganisasian yang dilakukan Kepala Panti menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, bahkan juga dilakukan secara lintas sektoral. Pengorganisasian lintas sektoral dilakukan mengingat pendidikan anak-anak terlantar tersebut dalam praktiknya melibatkan banyak pihak seperti sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya.

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram didukung oleh 28 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap. Sumber daya manusia tersebut tersebar ke dalam beberapa jabatan menurut struktur organisasinya yaitu sebagai Kepala Panti 1 orang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 orang, Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan 1 orang, Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran 1 orang, Fungsional Pekerja Sosial Muda Jenjang Ahli 1 orang, Fungsional Pekerja Sosial Penyelia Jenjang Terampil 2 orang, Fungsional Perawat Pelaksana Lanjutan 1 orang, Fungsional Perawat 1 orang, Staf Sub Bagian Tata Usaha 8 orang, Staf Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan 4 orang, Staf Seksi Penyantunan dan Penyaluran 7 orang.

Selain itu, Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram juga didukung sarana prasarana berupa; gedung kantor 1 unit, gedung asrama 8 unit, wisma 4 ruang, ruang makan dan dapur masing-masing 1 unit, gedung perpustakaan 1 unit, ruang ketrampilan 1 unit, gedung aula 1 unit, ruang pembinaan mental 1 unit, rumah dinas 4 unit, gedung show room 1 unit, pos jaga 1 unit dan sarana olah raga 1 unit.

Selain mengorganisasikan seluruh sumber daya insani dan non insani yang tersedia dalam Panti, Kepala Panti juga harus mengorganisasikan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan anak terlantar seperti sekolah-sekolah umum yang akan dijadikan tempat untuk bersekolah anak-anak terlantar tersebut dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Demikian juga pihak-pihak lainnya seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, LSM yang bergerak dalam bidang anak-anak terlantar, pekerja sosial masyarakat serta tokoh—tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengorganisasian yang dilaksanakan oleh Kepala panti yang meliputi sumber daya insani dan sumber daya non insani, dalam

upaya memperjelas dan mengefektifkan penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan, dalam hal ini pelayanan terhadap anak-anak terlantar dalam bidang pendidikan, termasuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Handoko yang dirujuk kembali oleh Husaini yang mengatakan pengorganisasian mengandung beberapa makna antara lain; (1). Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi, (2). Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatannya, serta setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok, (3). Hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan, dan (4). Cara manajer membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut (Usman, 2010).

Dalam pengorganisasian ini tampak jelas bahwa pendidikan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Hal ini terlihat ketika pengorganisasian juga termasuk melibatkan seluruh stakeholder yang berhubungan dengan permasalahan anak terlantar, seperti tokoh agama, tuan guru, para penyuluh agama di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi terhadap anak-anak terlantar, serta instansi pemerintah yang terkait seperti para kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi dan kabupaten/kota.

C. PENGAKTIFAN

Dalam fungsi pengaktifan (*actuating*) atau penggerakan orang-orang ke arah tujuan dilakukan dengan membagi pelayanan pendidikan anak terlantar ke dalam beberapa fungsi pelayanan yaitu;

Pertama, fungsi penyantunan dan pemulihan, fungsi ini digerakkan dengan berbagai jenis kegiatan yang mengandung unsur penyuluhan dan bimbingan sosial agar anak-anak terlantar mampu menanggulangi masalah yang dihadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya serta melakukan peran sosialnya secara wajar.

Kedua, fungsi perlindungan, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari keterlambatan, perlakuan kejam dan dieksplotasi oleh orang tuanya. Ketiga fungsi pengembangan yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yang ditekankan pada usaha penumbuhan, peningkatan, pengembangan potensi dan kemampuan serta kepribadian anak, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Keempat fungsi pencegahan yang ditekankan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak-anak dari pola-pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, dan sekaligus mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar. Keempat fungsi tersebut secara operasional dilaksanakan oleh pekerja sosial fungsional di bawah koordinasi kepala panti. Fungsi-fungsi tersebut lebih menekankan kepada anak-anak terlantar sebagai sasaran utamanya.

Selain itu ada juga fungsi pelayanan yang digerakkan oleh kepala panti yang sasaran utamanya adalah orang tua atau keluarga. Secara nomenklatur fungsi ini disebut sebagai tempat konsultasi orang tua atau keluarga, yang ditekankan untuk memberikan pelayanan konsultasi orang tua atau keluarga untuk membantu memantapkan orang tua atau keluarga dalam melaksanakan 8 fungsi keluarga bagi anak-anaknya yaitu; fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan dan sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi melindungi dan fungsi pembinaan lingkungan.

Pengaktifan merupakan fungsi manajemen dalam menggerakkan seluruh manusia yang bekerja pada Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram di bawah pimpinan Kepala Panti, agar proses pelayanan pendidikan anak terlantar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penggerakan tersebut menurut kepala panti banyak bertumpu pada pekerja sosial fungsional, agar terjadi hubungan harmonis antar mereka, sehingga dapat berkerja secara efektif. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh George R. Terry sebagaimana dirujuk oleh Syahrizal Abbas (2009) yang mengatakan bahwa pengaktifan atau penggerakan (*actuating*) merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan tingkah laku yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dengan demikian mereka dapat memperoleh

kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai sasaran tertentu pula.

Bagi seorang Kepala Panti, dalam menjalankan fungsi manajemen bidang pengaktifan ini tentu merupakan tantangan tersendiri, karena menyangkut manusia, yang mempunyai keinginan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu fungsi ini merupakan fungsi yang cukup penting dalam menggerakkan dinamika organisasi. Menggerakkan orang-orang dari berbagai tingkatan dan berbagai keinginan, harapan, tingkah laku, karakter, emosi, kepuasan dan sebagainya. Untuk melakukan semua itu memerlukan motivasi sehingga fungsi ini identik dengan fungsi kepemimpinan.

D. PENGENDALIAN

Pengendalian (*controlling*) atau sering juga digunakan istilah pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen. Fungsi pengendalian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perencanaan telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga boleh dikatakan fungsi pengendalian ini dapat berjalan bilamana fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Terry dalam Syahrizal Abbas (2009) yang mengatakan bahwa pengendalian merupakan suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pengendalian program kegiatan pendidikan anak-anak terlantar yang dikelola oleh Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram dilakukan dengan beberapa metode. Metode pertama disebut dengan istilah pembahasan kasus (*case conference*) dua tahap, pengendalian dengan pembahasan kasus dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan anak-anak terlantar yang menjadi binaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut pelayanan. Setiap angkatan kegiatan *case conference* dilaksanakan sebanyak dua tahap meliputi: pembahasan kasus tahap pertama dengan maksud menghasilkan sesuatu berupa pengenalan masalah, rencana penanganan (*treatment*), evaluasi kegiatan pelayanan sejak anak datang, perkembangan penanganan kasus, penemuan kasus baru, dan rencana *treatment*. Selanjutnya dilakukan pembahasan kasus tahap kedua dimaksudkan untuk menghasilkan sesuatu berupa, evaluasi

hasil kegiatan, pemberian rekomendasi dan keputusan kontrak pelayanan.

Selain itu pengendalian juga dilakukan dengan evaluasi program pelayanan. Evaluasi program pelayanan merupakan proses penilaian pelaksanaan program pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram, baik proses, hasil, maupun tindak lanjutnya. Pengendalian dengan evaluasi program pelayanan ini dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan yaitu; (1) peninjauan lapangan, petugas mendatangi lokasi sasaran ke 10 kabupaten/kota se NTB untuk melihat perkembangan anak-anak terlantar yang telah menerima pelayanan pendidikan oleh panti dan telah lulus pada jenjang SLTA serta sudah dikembalikan ke daerah asal masing-masing (2) pengisian instrumen evaluasi yang telah disiapkan, instrumen diisi langsung oleh petugas evaluasi atau diisi oleh petugas di daerah melalui penjelasan cara pengisian dan maksud kegiatannya, (3) pemantauan hasil pengasuhan, (4) peninjauan kesiapan daerah untuk mengirimkan anak-anak terlantar yang memang memenuhi syarat masuk panti untuk mendapat layanan pendidikan untuk tahun berikutnya.

Pengendalian terhadap seluruh proses pelayanan pendidikan anak-anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram dilakukan sebelum proses kegiatan yaitu melalui peninjauan lapangan, dengan menurunkan tim untuk bertemu dengan keluarga calon anak asuh untuk sosialisasi bagaimana proses pelayanan di dalam panti. Selain itu pengendalian juga dilakukan dalam proses pelayanan yang dibimbing oleh para pekerja sosial fungsional, dan juga pengendalian setelah proses kegiatan pelayanan pendidikan, yaitu dengan menurunkan tim kembali ke tengah-tengah keluarga eks anak asuh untuk mengetahui perkembangan alumni anak asuh setelah kembali ke masyarakat. Menurut Syahrizal Abbas (2009), pengendalian yang dilakukan sebelum proses kegiatan disebut dengan pengendalian preventif dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan. Sedangkan pengendalian setelah proses kegiatan disebut dengan pengendalian represif yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, dengan maksud agar tidak terjadi lagi pengulangan kesalahan dalam pelaksanaan yang berikutnya.

Pendidikan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat, ditinjau dari manajemennya baik dari segi perencanaan,

pengorganisasian, pengaktifan, dan pengendalian tampak berjalan secara rutinitas, dan seolah-olah tidak ada persoalan. Jika ditelaah secara seksama, dibalik fakta empiris yang tampak baik dan rutin itu, sesungguhnya menyimpan persoalan cukup krusial. Dari segi perencanaan misalnya, anak terlantar yang direncanakan setiap tahunnya hanyalah 80 orang se NTB, dan hal itupun tidak berarti setiap tahun ada 80 orang formasi bagi anak terlantar yang ingin mendapat pendidikan. Akan tetapi formasi yang terjadi hanyalah sebanyak anak yang lulus pada jenjang SLTA. Perencanaan ini berpengaruh terhadap proses lainnya seperti pengorganisasian, pengaktifan, serta pengendalian. Kondisi demikian secara teoritis sesungguhnya telah terjadi hegemoni negara terhadap kaum marginal, khususnya terhadap anak-anak terlantar.

Teori hegemoni Gramsci didasari tiga batasan konseptualisasi yang saling berhubungan, yaitu; perekonomian, negara dan masyarakat sipil. Namun demikian Gramsci lebih menekankan pada batasan konseptualisasi negara atau masyarakat politik, dan masyarakat sipil. Batasan konseptualisasi perekonomian digunakan untuk menjelaskan hegemoni yang bisa terjadi akibat hubungan kelas sosial antara pemilik sarana produksi dengan pekerja. Batasan konseptualisasi negara, digunakan untuk menjelaskan hegemoni yang bisa terjadi oleh lembaga-lembaga yang didanai oleh pemerintah seperti; polisi, militer, lembaga hukum, dan lembaga pendidikan. Sedangkan batasan konseptualisasi masyarakat sipil, digunakan untuk menjelaskan hegemoni yang dapat terjadi oleh lembaga di luar dua batasan tadi. Hal yang terakhir bisa terjadi pada lembaga-lembaga sosial religius yang tidak didanai oleh negara (Bocock, 1986).

Pendidikan anak-anak terlantar dari aspek manajemennya, maka tampak jelas terjadi hegemoni oleh negara dalam bentuk kekerasan simbolik. Dari 201.699 jumlah anak terlantar, yang dikelola dengan baik oleh pemerintah hanya sebagian kecil saja yaitu 80 anak setiap tahun. Hal itu terjadi terus menerus, dan seolah-olah sudah merupakan sesuatu yang wajar, karena wacana yang dikembangkan oleh pemerintah, dapat diterima oleh masyarakat marginal, yaitu dengan argumen terbatasnya kemampuan keuangan negara. Disisi yang lain pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan hak warga negara, termasuk anak-anak terlantar. Pada konteks inilah telah terjadi hegemoni dalam bentuknya yang sangat halus yaitu berupa kekerasan simbolik.

BAB X

MODEL PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR

Model penanganan anak terlantar yang telah terbangun selama ini dikelompokkan ke dalam dua model pelayanan yaitu model panti dan model non panti (Soemarno, 2004). Pendidikan anak terlantar yang dikelola oleh Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram, dilaksanakan dengan model panti dan sekaligus model non panti. Model panti dapat dilihat bahwa, anak-anak terlantar yang akan memperoleh pendidikan seluruhnya diasramakan di dalam panti. Selain itu mereka juga memperoleh pelayanan berupa kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian seragam sekolah, pakaian sehari-hari, uang transport, kebutuhan buku-buku, kebutuhan untuk les tambahan mata pelajaran dan lain-lain. Sedangkan pendidikan anak terlantar model non panti dapat terlihat ketika anak-anak terlantar tersebut yang terdiri dari anak usia sekolah tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA memperoleh layanan pendidikan dengan secara tersebar di beberapa sekolah formal. Selain itu anak-anak terlantar juga memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan di beberapa lembaga kursus, seperti kursus komputer, kursus perbengkelan dan kewirausahaan di Balai Latihan Kerja.

Data sebaran anak-anak terlantar di beberapa sekolah untuk mengikuti pendidikan formal menunjukkan bahwa panti merupakan tempat penampungan mereka, sedangkan pendidikannya diselenggarakan oleh sekolah-sekolah umum dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Model pendidikan anak terlantar di Nusa Tenggara Barat menganut model semi panti. Jika model panti, semestinya anak-anak terlantar melaksanakan segala aktivitasnya di

dalam panti, sedangkan model luar panti menyelenggarakan seluruh proses kegiatan pendidikan di luar panti.

Pendidikan anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram melaksanakan kegiatan di dalam panti dan juga di luar panti. Kegiatan pendidikan di dalam panti meliputi beberapa kegiatan seperti; ceramah agama, bimbingan sosial dan keterampilan yang terdiri dari beberapa kegiatan (olahraga, membantu ibu asuh memasak di dapur, belajar komputer, belajar musik, imtaq bersama), dan juga kegiatan bimbingan les mata pelajaran (matematika, Bahasa Inggris, Bakat dan Seni, Bimbingan Konseling dan Kewirausahaan). Sedangkan kegiatan pendidikan di luar panti meliputi semua proses pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing, termasuk juga bimbingan keterampilan kerja bagi anak-anak panti yang telah menamatkan pendidikan formalnya setingkat SLTA. Bimbingan keterampilan kerja ini dilakukan bekerja sama dengan beberapa lembaga lain seperti Balai Latihan Kerja, dan juga dengan AMIKOM (Akademi Manajemen Informatika dan Komputer) Mataram. Pelatihan keterampilan kerja tersebut dimaksudkan untuk membekali anak-anak terlantar yang telah menamatkan pendidikan formalnya tingkat SLTA dengan kemampuan kerja agar bisa mandiri setelah mereka dikembalikan kepada pihak keluarganya atau setelah meninggalkan panti untuk bekerja dan melanjutkan kehidupan di luar panti untuk menatap masa depannya.

Setiap tahun Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram menyampaikan formasi tentang anak-anak terlantar yang akan dibina. Formasi tersebut disampaikan kepada Dinas Sosial kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. Dalam merespon informasi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Organisasi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk menghimpun data tentang anak-anak terlantar di wilayahnya masing-masing. Data yang telah diperoleh dari masyarakat tersebut disampaikan oleh lembaga-lembaga mitra tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Panti Sosial Asuhan Anak Harapan di Ibu Kota Provinsi. Data yang disampaikan oleh semua Dinas Sosial Kabupaten/Kota diverifikasi oleh tim dan dilakukan seleksi serta kunjungan rumah. Bagi yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ditampung di dalam panti dan disalurkan ke sekolah-sekolah formal sesuai dengan jenjang sekolah yang harus diikuti oleh anak-anak

terlantar tersebut. Mereka akan berada dalam panti sampai dengan lulus sekolah formal tingkat SLTA. Setelah lulus SLTA mereka mendapatkan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja atau lembaga-lembaga kursus sesuai minat dan bakat anak-anak tersebut. Setelah mendapat pelatihan selama tiga bulan anak-anak tersebut dikembalikan kepada keluarganya untuk menjalani kehidupan selanjutnya.

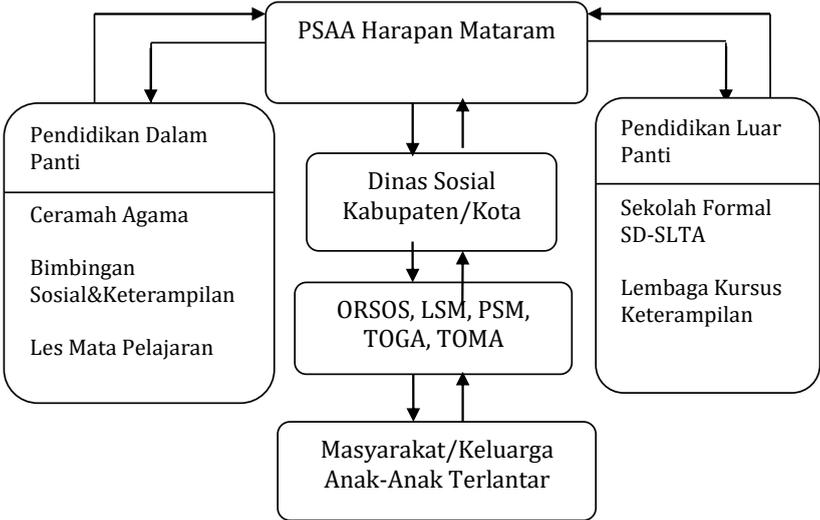
Model pendidikan anak terlantar yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat dapat ditelaah lebih dalam dari perspektif teori sosial khususnya teori pilihan rasional Raymond Boudon. Selanjutnya dijelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang mendasari teori pilihan rasional. Prinsip pertama ialah menjelaskan suatu fenomena sosial berarti menjadikannya sebagai akibat atau konsekuensi dari seperangkat pernyataan yang harus bisa diterima sepenuhnya dengan mudah. Prinsip kedua, teori sosiologi yang baik adalah suatu teori yang menafsirkan segala fenomena sosial sebagai hasil dari tindakan-tindakan individu. Prinsip ketiga, tindakan-tindakan harus dianalisis sebagai tindakan yang rasional (Turner, 2012).

Teori pilihan rasional dapat menjelaskan model pendidikan anak terlantar, diawali dengan prinsip pertama bahwa model pendidikan anak terlantar yang dilakukan dengan model semi panti merupakan suatu pilihan rasional yang bisa menjelaskan fenomena sosial dan dengan mudah bisa diterima. Model semi panti ini dilakukan karena dalam panti tidak tersedia sumberdaya baik insani maupun non insani untuk mendukung proses pendidikan dapat sepenuhnya dilaksanakan di dalam panti. Selain itu panti sosial tidak dikonstruksi untuk layanan pendidikan formal, tetapi untuk layanan penyantunan bagi anak-anak yang mengalami masalah sosial. Pendidikan formal secara kelembagaan merupakan ranah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan layanan sosial merupakan ranah Dinas Sosial. Dengan alasan rasional demikian tentu saja pilihan alternatif dengan model semi panti, dengan mudah dapat kita terima.

Prinsip kedua teori pilihan rasional ialah bahwa teori sosial yang baik ialah menafsirkan setiap fenomena sosial sebagai hasil dari tindakan-tindakan individu, ditambahkan prinsip ketiga yaitu bahwa tindakan-tindakan individu itu harus dianalisis secara rasional. Pendidikan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat merupakan fenomena sosial sebagai hasil dari tindakan individu-individu yang meliputi berbagai pihak yang berkepentingan seperti; Gubernur,

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Panti dan stakeholder yang menaruh minat bidang pendidikan anak terlantar. Pilihan model yang dilakukan dengan semi panti, sebagai konsekuensi dari tindakan individu-individu tersebut tentulah telah dianalisis secara rasional. Misalnya, jika model yang dipilih dengan model panti sepenuhnya baik penyantunan maupun pendidikan formalnya, tentu saja akan terjadi tumpang tindih dengan tugas pokok masing-masing kelembagaan, terutama antara Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan. Sementara itu jika sepenuhnya dilakukan di luar panti, maka perlu ada persiapan dengan model apa pendidikan anak-anak terlantar akan dilakukan. Persiapan segala perangkat yang diperlukan untuk implementasi sebuah program kelembagaan tentu memerlukan studi yang memadai. Jikapun ada gagasan yang lebih menarik untuk pelaksanaan pendidikan anak-anak terlantar masa mendatang, tentu saja proses yang telah ada tetap berjalan sebagai pilihan alternatif yang rasional, sebelum muncul pilihan rasional berikutnya dan siap diimplementasikan.

Gambar 1. Model Pendidikan Anak Terlantar di PSAA Harapan Mataram NTB



Sumber: Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram (Dikonstruksi dari proses yang ada)

BAB XI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR

Ditinjau dari perspektif kebijakan pemerintah sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh keluarganya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak, dan merupakan pertimbangan terakhir bagi anak. Selanjutnya dalam Undang-Undang yang sama pasal 26 juga menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Jika anak-anak berada dalam situasi orang tuanya tidak ada lagi, atau tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya serta tanggung jawabnya karena sesuatu sebab, maka kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih Lanjut dalam pasal 30 Undang-Undang yang sama dijelaskan dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya, maka terhadap mereka dapat dilakukan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dilihat dari uraian beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka kebijakan pemerintah berkaitan dengan pendidikan anak-anak terlantar sesungguhnya lebih ditekankan kepada tanggung jawab keluarga, baik keluarga inti maupun dalam keluarga yang lebih besar.

Dalam faktanya anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat tidak memperoleh haknya sebagai anak khususnya hak sosialnya berupa pendidikan, disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi tanggung jawabnya. Sehingga dengan demikian sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian maka tanggung jawab tersebut sudah seharusnya diambil alih oleh negara dalam hal ini pemerintah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil alih tanggung jawab keluarga dalam hal pendidikan anak-anak terlantar melalui kebijakan penyantunan dan pendidikan melalui Panti Sosial. Meskipun dalam praktik belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena kemampuan Pemerintah Provinsi terbatas.

Teori Hegemoni Gramsci dapat digunakan sebagai rujukan untuk membahas kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan anak terlantar. Hegemoni menurut Gramsci bukanlah hubungan dominan dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan kepemimpinan politik dan ideologis (Mahfud, 2009). Teori hegemoni Gramsci mensyaratkan penggunaan kekuatan koersif negara sebagai pilihan terakhir, bilamana dengan kepemimpinan politik dan ideologis gagal mencapai konsensus. Selanjutnya Gramsci lebih menekankan pembuatan konsensus antar kelompok yang ada.

Kebijakan pemerintah dalam konteks pendidikan anak terlantar tampaknya dengan mudah mencapai konsensus, sebagaimana gagasan gramsci, karena dalam faktanya memang tidak ada penolakan dari pihak kelompok sosial manapun terhadap kebijakan pendidikan anak terlantar melalui panti tersebut. Meskipun sesungguhnya kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 Ayat (2) yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini menandakan bahwa teori hegemoni Gramsci terjadi, dalam konteks kebijakan pemerintah mengenai pendidikan anak-anak terlantar yang berhasil memperoleh konsensus

dari masyarakat, meskipun yang terjangkau hanya sebagian kecil saja dari total jumlah anak terlantar yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.

Teori hegemoni Gramsci sangat berpengaruh dalam perumusan kebijakan pendidikan khususnya dalam konsep perang posisi dan demokratisasi kehidupan sosial (Tilaar, 2009). Dalam konsep perang posisi, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya peningkatan kemampuan dari kelas masyarakat tertentu. Dengan kemampuan yang meningkat maka para anggota dari kelas masyarakat tertentu dapat menempatkan dirinya atau mengubah kelasnya dalam masyarakat dalam kedudukan yang lebih tinggi. Hal itu dapat terjadi dalam kultur masyarakat demokratis.

Konsep perang posisi dan demokratisasi kehidupan sosial belumlah optimal dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat marginal, khususnya anak-anak terlantar. Kultur hegemoni seperti wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sampai saat ini hanyalah retorika politik, lebih-lebih bagi anak-anak terlantar yang dalam perspektif Gramsci dipandang sebagai upaya mendoktrin masyarakat dengan kesadaran palsu. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat marginal secara optimal melalui pendidikan, maka konsep perang posisi dan demokratisasi kehidupan sosial harus diterapkan secara nyata dalam membuat kebijakan pendidikan anak terlantar. Dengan diberikannya ruang seluas-luasnya kepada anak-anak terlantar untuk memperoleh pendidikan melalui kebijakan pemerintah, maka dapat dimaknai sebagai kesempatan kelompok kelas marginal untuk mengubah posisi kelasnya dalam masyarakat. Gerakan semacam itu dilakukan oleh Paulo Preire dalam program pemberantasan buta huruf bagi kaum tertindas di Brazil.

Selain teori hegemoni Gramsci, kebijakan pendidikan anak terlantar juga dapat dibahas dari perspektif teori relasi kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault. Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah suatu milik yang dapat dikuasai dan digunakan oleh kelas tertentu untuk mendominasi dan menindas kelas yang lain. Kekuasaan tidak juga semata-mata bersifat negatif dan represif, kekuasaan justru beroperasi secara positif dan produktif (Mahfud, 2009). Jika kita bahas kebijakan pemerintah bidang pendidikan anak terlantar dari perspektif teori relasi kekuasaan dan pengetahuan Foucault, maka kebijakan yang diimplementasikan selama ini belumlah sejalan. Argumentasi logisnya ialah bahwa kekuasaan yang berada pada pihak

pengambil kebijakan belumlah beroperasi secara produktif. Misalnya kebijakan pelayanan pendidikan anak terlantar hanya melalui panti sosial dan satu-satunya yang ada di Ibukota Provinsi, sedangkan anak-anak terlantar tersebar dalam jumlah yang relatif besar di seluruh kabupaten/kota. Kebijakan ini tentu merupakan operasi kekuasaan yang tidak produktif. Foucault menyusun konsep tentang sebuah relasi setara yang saling membentuk antara kekuasaan dengan pengetahuan sehingga menjadi tak terpisahkan dari rezim-rezim kekuasaan. Pengetahuan terbentuk dalam praktik-praktik kekuasaan, dan turut berperan dalam perbaikan dan perawatan teknik-teknik baru kekuasaan. Umumnya kekuasaan hanya tertuju pada negara dan kelas elit. Foucault membuka kemungkinan untuk membongkar semua dominasi dan relasi kekuasaan. Seperti kekuasaan dalam pengetahuan antara para pencipta diskursus; birokrat, akademisi dan rakyat miskin jelata. Selanjutnya menurut Foucault, kekuasaan dan pengetahuan bukanlah milik melainkan strategi. Hal ini dapat dimaknai bahwa kekuasaan dan pengetahuan yang ada pada berbagai pihak, khususnya pemerintah haruslah digunakan sebagai strategi untuk mengentaskan anak-anak terlantar dari kebodohan dan kemiskinan salah satunya melalui pendidikan.

BAB XII

AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR

Data terkait jumlah anak yang dapat ditampung menandakan akses pendidikan bagi anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat sangat terbatas. Fakta empiris tersebut mendapat pembenaran dari beberapa anak-anak terlantar yang mengatakan tidak mampu untuk bersekolah karena tidak punya biaya, dan mengatakan bahwa sekolah itu mahal dan orang tua tidak punya uang. Secara faktual akses pendidikan bagi anak-anak terlantar dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas masih sangat sulit di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Tampaknya akses pendidikan bagi anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat cukup mengalami masalah dari segi keterjangkauan, karena penekanan pernyataan tersebut terletak pada masalah keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi. Ditinjau dari aspek ketersediaan, akses pendidikan yang berupa ketersediaan sekolah baik jenjang Sekolah Dasar maupun SMA/SMK tentu sudah tersedia. Namun demikian ketersediaan infrastruktur bagi daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Barat menjadi masalah tersendiri. Seperti sulitnya transportasi untuk menuju sekolah yang sangat jauh dari perkampungan penduduk terutama pada jenjang Sekolah Dasar.

Jika berbicara masalah akses pendidikan bagi anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat, baik dari perspektif ketersediaan maupun dari segi keterjangkauan maka dapat dikatakan sangat rendah. Terbukti dalam fakta lapangan anak-anak terlantar hampir seluruhnya tidak mampu mengakses pendidikan, kecuali mereka yang memperoleh kesempatan melalui Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

Mataram. Faktor kemiskinan menjadi penghambat utama bagi anak-anak terlantar bisa memperoleh akses pendidikan. Di pihak yang lain Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi mempunyai masalah dengan keterbatasan anggaran, hal itu menghambat perluasan akses bagi anak-anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.

Perluasan akses pendidikan bagi anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat, menjadi penting karena secara faktual anak-anak terlantar sangat banyak sementara daya tampung panti sosial untuk memfasilitasi anak-anak terlantar mendapat pendidikan sangat terbatas. Mencermati persoalan nyata yang dihadapi yaitu keterbatasan daya tampung panti sosial dan masalah keterbatasan anggaran pada Pemerintah Provinsi, maka sudah selayaknya masalah tersebut dipikirkan oleh banyak pihak, untuk mencari solusi. Terutama pihak Pemerintah Kabupaten/Kota semestinya ikut mencari solusi atas permasalahan anak-anak terlantar terutama yang ada di wilayahnya masing-masing.

Kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah umum bagi anak-anak terlantar merupakan karunia yang luar biasa. Bahkan bagi mereka, apa yang diperolehnya sekarang melalui panti tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jangankan terbayang untuk memperoleh kesempatan sekolah, bahkan untuk makan sehari-haripun kami sangat sulit. Beruntunglah ada orang datang ke rumah di mana mereka tinggal, dan memperkenalkan program pemerintah melalui pekerja sosial, sekaligus mengajak mereka untuk bersekolah jika mereka mempunyai keinginan yang kuat.

Anak-anak terlantar meskipun mempunyai niat yang kuat untuk sekolah, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengakses dunia sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh karena keluarganya yang miskin, orang tuanya yang tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Tetapi beruntung baginya dapat memperoleh kesempatan melalui panti dengan biaya pemerintah. Tidak terbayangkan anak-anak terlantar lainnya yang belum memperoleh keberuntungan mereka sama sekali tidak mampu memperoleh akses pendidikan. Dengan demikian secara keseluruhan akses pendidikan bagi anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat masih sangat rendah.

Program pendidikan gratis pemerintah pada jenjang pendidikan dasar memang sudah diterapkan di Nusa Tenggara barat terutama pada tingkat Sekolah Dasar, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama

masih dikenakan berbagai pungutan, lebih-lebih pada sekolah yang berstatus Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional. Namun demikian, bagi anak-anak terlantar pendidikan gratis pada jenjang Sekolah Dasar tidak secara langsung bisa dijangkaunya. Hal itu disebabkan oleh karena bersekolah tidak semata-mata memerlukan biaya untuk SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), tetapi juga memerlukan biaya untuk transportasi, biaya buku, alat tulis, pakaian seragam dan sebagainya. Dengan demikian dalam konteks pendidikan dasar khususnya Sekolah Dasar, bagi anak-anak terlantar tetap tidak sanggup untuk menjangkau akses pendidikannya.

Akses pendidikan bagi anak-anak terlantar diupayakan diperluas secara terus menerus. Seperti misalnya pemerintah provinsi menyediakan pendidikan khusus layanan khusus. Sekolah tersebut menggunakan prinsip rumah singgah yang bisa diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus dan juga bagi anak-anak terlantar. Namun demikian jika dilihat dari perspektif pendidikan untuk semua, maka akses pendidikan yang diupayakan tersebut masih sangat terbatas. Seperti misalnya pendidikan khusus layanan khusus tersebut, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat baru tersedia di dua lokasi yaitu di Gerung Kabupaten Lombok Barat dan di Kabupaten Lombok Timur.

Pendidikan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat, sesungguhnya bisa dituntaskan, asal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serius memberikan akses sepenuhnya kepada anak-anak tersebut. Secara fakta dikemukakan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat terbatas. Lembaga yang menangani anak-anak terlantar dan dibiayai oleh negara dalam hal ini Pemerintah provinsi hanya ada satu-satunya yaitu Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram. Tempat tersebut diperuntukkan bagi anak-anak terlantar di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat

Tanpa bermaksud untuk mengecilkan arti upaya pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pendidikan anak-anak terlantar, Jika menyimak pernyataan Kepala SMK Negeri 5 Mataram tersebut sangatlah logis. Jika komitmen pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota disinergikan dalam upayanya secara serius memperluas akses pendidikan anak-anak terlantar, maka pendidikan bagi anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat niscaya dapat dituntaskan. Dengan demikian pembicaraan perihal akses

pendidikan akan berpulang pada *political will* pemerintah dalam bidang pendidikan.

Terbatasnya serta sangat sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak terlantar diakui oleh orang tua salah seorang anak terlantar yang dibina di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram. Setelah ditinggal mati oleh suaminya, yang bersangkutan membesarkan 6 orang anak dengan pekerjaan menjadi tukang memperbaiki kasur. 2 orang anaknya beruntung bisa sekolah melalui Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram.

Terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak terlantar, dapat dibahas secara mendalam dari perspektif teori gerakan sosial Pierre Bourdieu. Gagasan Bourdieu menggunakan beberapa konsep untuk menganalisis asal-usul struktur sosial dalam masyarakat yaitu; habitus, modal dan ranah. Habitus menurut Bourdieu merupakan pola persepsi, pemikiran dan tindakan yang bertahan dalam jangka panjang yang disebabkan oleh suatu kondisi objektif, namun tetap berlangsung, dan bahkan ketika kondisi tersebut sudah berubah (Mahfud, 2009). Konsep habitus ini merupakan kunci dari teori reproduksi kelas yang menjelaskan bahwa generasi dari satu kelas tertentu, memastikan dirinya akan mereproduksi dirinya dan mewariskan hak istimewa kepada generasi berikutnya. Berdasarkan konsep habitus yang mendasari teori reproduksi kelas, maka kondisi terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak terlantar dengan mudah bisa dipahami. Anak-anak terlantar secara empiris memang berasal dari masyarakat marginal, masyarakat miskin dan berada pada kelas bawah. Habitus anak-anak terlantar dalam waktu lama dan terus menerus terinternalisasi dalam diri mereka dan membentuk praktik-praktik kehidupan sosial. Habitus yang terinternalisasi dalam setiap anak terlantar menggunakan berbagai macam bentuk dalam memanifestasikan dirinya ke dalam setiap aspek dari interaksi mereka dengan lingkungan sosialnya. Selain berupa tingkah laku dan cara dalam berbicara, bahkan juga dalam tingkat ide, cara berpakaian dan sebagainya. Habitus dalam keseharian mereka yang berbentuk ide misalnya hanya berada pada lingkup bagaimana caranya pada hari itu mereka bisa makan untuk bertahan hidup. Dalam situasi sosial keluarga yang demikian, maka tidak pernah terbayangkan dalam benaknya untuk berpikir bagaimana mereka bisa mendapat akses pendidikan. Untuk merubah situasi sosial yang demikian maka diperlukan

sentuhan program pemerintah, agar satu generasi dapat meningkatkan kelasnya dalam masyarakat.

Selain konsep habitus, Bourdieu juga menjelaskan tentang konsep modal dan ranah dalam konteks teori perubahan sosial. Konsep modal sangat terkait dengan habitus. Ada tiga macam modal yang dijelaskan oleh Bourdieu yaitu modal ekonomi, modal budaya dan modal simbolis. Modal ekonomi antara lain harta benda, uang, serta harta milik lainnya. Modal budaya antara lain informasi, pendidikan, keterampilan dan sebagainya. Sedangkan modal simbolis misalnya; agama, kharisma, dan sebagainya. Modal-modal tersebut tidak bersifat tertutup, akan tetapi memungkinkan antara modal yang satu dengan modal lainnya saling bersentuhan. Misalnya saja untuk memiliki modal budaya seperti pendidikan, maka sangat memerlukan dukungan modal ekonomi. Demikian halnya kepemilikan modal ekonomi dan modal budaya, bisa memungkinkan seseorang memiliki modal simbolis berupa status sosial misalnya. Dengan demikian konsep modal menurut Bourdieu mempengaruhi habitus seseorang dalam kehidupan sosial. Bagi anak-anak terlantar tiadanya modal ekonomi memberi andil terhadap tidak terjangkaunya akses pendidikan. Kepemilikan salah satu modal dapat menegasi atau menghadirkan modal lainnya. Jika pemerintah mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak terlantar, itu berarti pemerintah telah memberikan modal budaya kepada mereka. Kepemilikan modal budaya dapat menegasi atau menghadirkan modal lainnya dikemudian hari. Sebaliknya jika pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya tidak menyediakan akses pendidikan kepada anak-anak terlantar, padahal Undang-Undang Dasar telah mengamanatkannya, maka hal itu dalam konteks teori Bourdieu dapat dipandang sebagai kekerasan simbolis. Kekerasan simbolis oleh Bourdieu digunakan untuk menjelaskan mekanisme-mekanisme dominasi (Haryatmoko, 2008). Kekerasan simbolis dalam kehidupan sosial menampakkan dirinya sebagai sebuah penggunaan kekuasaan yang timpang akan tetapi memperoleh konsensus dari pihak yang dikuasai dan bahkan merasa solider dengan kebijakan yang timpang tersebut. Dapat dijelaskan bahwa tidak adanya keadilan dari pemegang kekuasaan, dalam hal demokratisasi kehidupan sosial, khususnya akses pendidikan bagi anak-anak terlantar, tampak sebagai sebuah kebijakan yang telah memperoleh konsensus dari

masyarakat kelas bawah. Kondisi semacam inilah dalam gagasan Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolis.

Selanjutnya Bourdieu juga menjelaskan tentang konsep ranah. Ranah (*field*) dijelaskan Bourdieu sebagai arena sosial tempat bercengkeramanya habitus-habitus, yang di dalamnya terdapat berbagai perjuangan dan manuver antar habitus dalam memperebutkan makna, sumber daya, saling mengungguli, mencari pengakuan, memposisikan diri dan sebagainya. Ranah (*field*) ini disebut juga sebagai medan perjuangan, tempat habitus-habitus bersaing memperebutkan berbagai posisi dalam kehidupan sosial, termasuk akses pendidikan. Antara habitus, modal dan ranah mempunyai keterkaitan satu sama lain. Besarnya kepemilikan modal menentukan habitus dan ranah tempat para pelaku untuk bereksistensi. Demikian halnya dalam habitus selalu menempel modal (*capital*) dalam proses pergulatannya. Dengan *capital*, maka habitus dapat melakukan kreasi-kreasi yang saat bersamaan berada dalam ranah atau medan perjuangan. Bagi anak-anak terlantar dalam upayanya ikut bermain pada ranah perjuangan untuk mencari eksistensi dirinya sangatlah lemah, karena tidak ada dukungan berbagai modal; baik modal ekonomi, modal budaya maupun modal simbolis. Situasi demikian membuat teori reproduksi kelas menurut Bourdieu mencapai kebenarannya secara rasional dan faktual. Karena tanpa adanya *political will* dari pemegang kekuasaan, dengan memperlebar akses pendidikan bagi anak-anak terlantar, mustahil anak—anak terlantar dapat merubah kelasnya dalam struktur sosial.

BAB XIII

MAKNA PENTING PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR

Melayani anak termasuk melayani dalam bidang pendidikannya merupakan kepentingan terbaik bagi bangsa, sehingga sudah seharusnya setiap anak bisa sekolah, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak, baik anak-anak yang tergolong fakir miskin maupun anak-anak terlantar. Bahkan semestinya anak-anak yang mengalami masalah dengan hukumpun sudah sewajarnya mendapatkan haknya untuk bersekolah. Pendidikan anak terlantar tentu menjadi kunci kemajuan bagi bangsa, khususnya bagi anak-anak terlantar itu sendiri.

Cita-cita masa depan anak-anak sangat ditentukan oleh pendidikannya sekarang. Bekerja dan memperoleh penghasilan merupakan impian bagi semua anak-anak, teristimewa anak-anak terlantar. Hal ini tertanam dalam pikiran mereka karena secara langsung mereka alami dalam kehidupannya. Bagaimana susahny orang tua mereka mendapatkan pekerjaan, merupakan pelajaran berharga bagi mereka, agar kelak kemudian hari bisa mengubah situasi yang sangat menyulitkan bagi orang tuanya tersebut, melalui upayanya untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan memperoleh kesempatan bersekolah, maka seolah-olah impiannya untuk memperoleh pekerjaan akan semakin dekat, meskipun pada kenyataannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Pendidikan menjadi impian sebagai sarana untuk memperoleh keterampilan dan keahlian, sehingga dengan keahliannya nanti tentu saja lebih mudah untuk mendapatkan

pekerjaan dengan penghasilan yang akan sangat berarti bagi perubahan kehidupannya.

Impian yang sangat indah bagi anak-anak bangsa yang mendapat julukan sebagai anak-anak terlantar, tentu sangat sulit untuk diwujudkan sendiri. Karena itulah mereka membutuhkan dukungan dari banyak pihak, terutama pemerintah agar-agar cita-cita mereka terwujud. Dukungan dapat berupa dukungan moral dan dukungan finansial, yang secara riil memang mereka butuhkan. Dukungan tersebut akan bisa terwujud, jika ada *political will* dari Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, bahkan yang tidak kalah pentingnya ialah *political will* dari pihak Pemerintah Pusat. Harapan akan dukungan dari semua pihak cukup beralasan, mengingat anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat Undang-Undang dasar 1945 Pasal 34 ayat (!) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pengertian dipelihara oleh negara, tentu menyangkut banyak aspek seperti; kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial. Salah satu kebutuhan sosial yang penting ialah kebutuhan pendidikan, mengingat pendidikan merupakan kunci bagi maju mundurnya sebuah peradaban bangsa. Jika pendidikannya maju, maka dapat dipastikan bangsa tersebut dengan segala aspeknya pasti mengalami kemajuan. Sebaliknya jika pendidikannya terbelakang, maka dapat dipastikan juga bangsa tersebut akan lambat menggapai kemajuannya. Bangsa yang maju bertumpu pada sumber daya manusia yang unggul secara kualitas, sementara itu sumber daya manusia yang berkualitas merupakan produk dari proses pendidikan yang unggul. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan pendidikan bagi semua warga negaranya secara unggul dan berkualitas jika negara ingin mencapai kemajuan secara cepat.

Pendidikan anak-anak terlantar bermakna sebagai pengubah status sosial seseorang. Dalam konteks ini pendidikan dapat mengubah status sosial anak itu sendiri bahkan status keluarga yang dibangunnya dikemudian hari, bahkan sangat mungkin juga bagi keluarganya sekarang jika masih punya keluarga. Karena itu menurutnya pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kebodohan. Jika kebodohan telah terentaskan maka secara otomatis kemiskinan juga dapat dikurangi, karena

dengan anak-anak yang terdidik tentu lebih inovatif dalam mengisi kehidupannya.

Makna pendidikan sebagai pengubah status sosial seseorang, menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk diraih, tidak hanya bagi anak-anak yang tidak beruntung tetapi juga bagi pemerintah. Karena sebuah pemerintah yang dapat mengentaskan pendidikan bagi generasi bangsanya tentu saja bangsa tersebut akan lebih mudah menuju predikat sebagai negara maju, dibandingkan dengan sebuah bangsa yang sebagian besar masyarakatnya tidak berpendidikan.

Pendidikan anak-anak terlantar, sebagaimana juga pendidikan bagi anak-anak lainnya dimaknai beragam oleh berbagai kalangan. Pada umumnya pemaknaan terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak terlantar yang dikemukakan oleh berbagai pihak, baik pejabat publik, pekerja sosial, maupun anak-anak terlantar itu sendiri, berkisar untuk memerangi kebodohan, menambah ilmu dan keterampilan, serta memudahkan untuk mencari pekerjaan untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Secara implisit sesungguhnya terkandung berbagai makna penting yang sangat mendasar bagi kelangsungan kehidupan anak-anak terlantar yang merupakan anak-anak bangsa generasi mendatang. Ada beberapa makna penting yang dapat diungkapkan berkaitan dengan pendidikan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat sebagaimana dideskripsikan berikut ini.

Pertama makna **pembebasan**, pembebasan dapat diinterpretasi secara luas, sesuai dengan cara pandang masing-masing. Seperti misalnya persepsi makna pendidikan anak terlantar yang dikemukakan oleh para pekerja sosial fungsional, yang lebih banyak menceritakan bahwa mantan anak-anak asuhnya telah banyak yang menjadi orang-orang yang berhasil, baik di pemerintahan maupun pada dunia usaha. Hal itu dapat dimaknai bahwa pendidikanlah yang menjadikan mereka orang-orang berhasil sehingga dapat membebaskan dirinya dan keluarganya, baik dari kemiskinan maupun kebodohan. Makna pendidikan anak-anak terlantar yang dikonstruksi sebagai makna pembebasan, senada dengan pendapat Tilaar yang mengatakan bahwa pendidikan abad ke-21 mempunyai hakikat sebagai proses pembebasan manusia (Tilaar, 2009).

Arti pembebasan anak-anak terlantar dalam konteks pendidikan ialah, bahwa dengan pendidikan mereka tidak lagi hidup terisolasi dalam kehidupan sosial hanya dalam komunitasnya saja, mereka bebas dalam relasi dan interaksi dengan sesama manusia yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat dan identitas sebagai kelompok marginal. bodoh dan miskin. Namun demikian kebebasan yang diperoleh bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Hal itu juga dapat diartikan sebagai kebebasan yang saling menguatkan antar sesama dalam hal disiplin hidup, saling tolong menolong, menghargai perbedaan. Kebebasan bukanlah untuk saling menindas antar manusia. Penyadaran tentang pentingnya makna pembebasan bagi anak-anak terlantar, dapat dilakukan melalui pendidikan agar mereka mampu keluar dan mengubah stigma yang menempel pada dirinya selama ini. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Paulo Freire (2009), bahwa agar kaum tertindas dapat melakukan perjuangan untuk kebebasannya, maka mereka harus memahami realitas penindasan tidak sebagai dunia yang tertutup dan sama sekali tidak ada pintu keluar, tetapi sebagai suatu situasi sementara yang dapat mereka ubah. Penyadaran akan realitas bahwa komunitas masyarakat miskin yang memproduksi anak-anak terlantar bukanlah realitas yang abadi dan tidak bisa diubah, tetapi realitas sementara dan dapat serta harus diubah, hal itu dapat dilakukan melalui pendidikan.

Untuk mencapai makna pembebasan tersebut dalam implementasi yang nyata, maka penciptaan akses pendidikan bagi anak-anak terlantar, haruslah dipandang sebagai strategi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, karena kekuasaan yang ada pada pemerintah bukanlah milik baginya, tetapi sebuah strategi untuk mendistribusi kekuasaan tersebut, dalam konteks pendidikan agar semua lapisan masyarakat dapat terlayani, termasuk anak-anak terlantar. Dengan demikian anak-anak terlantar suatu ketika akan memiliki pengetahuan, sehingga berarti juga memiliki kekuasaan, karena menurut Foucault kekuasaan dan pengetahuan merupakan sebuah relasi. Pada hakikatnya kekuasaan tidak menjadi milik kelas tertentu saja dalam masyarakat, tetapi bersifat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan menjadi strategi. Hal ini sejalan dengan gagasan Foucault yang dengan tegas mengatakan bahwa

kekuasaan tidak selalu bersifat refresif, tetapi juga bersifat produktif (Mahfud, 2009).

Gagasan ini tentu menjadi indah ketika dapat menjadi praktik nyata dalam membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang menunjukkan keberpihakan kepada kaum marginal, seperti kelompok masyarakat miskin dan anak-anak terlantar. Pandangan Foucault yang memandang kuasa bukanlah negatif, melainkan positif dan produktif, mengandung arti bahwa kuasa dapat diperoleh dan diefektifkan melalui pengetahuan, dan pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara salah satunya yang paling umum ialah melalui pendidikan.

Kedua, makna **pemanusiaan**, pendidikan dapat menjadikan manusia seutuhnya, manusia yang dihargai dari segi kemanusiaannya. Keberlangsungan pendidikan yang memanusiakan dinilai sangat penting bagi anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat. Pendidikan baginya sangat penting, jika tidak dapat memperoleh pendidikan sebagaimana yang dijalannya sekarang dia beranggapan bahwa kehidupannya hanya akan mampu menjadi peminta-minta. Stigma sebagai anak terlantar dan sebagai peminta-minta telah merendahkan hakikat kemanusiaannya. Mereka hanya akan memperoleh anggapan di masyarakat sebagai orang yang tidak berguna, orang yang mengganggu orang lain di perempatan jalan, orang yang tidak bermartabat dan berbagai julukan negatif lainnya. Dengan pendidikan anak-anak terlantar telah membangun mimpinya untuk menjadi manusia yang meraih hakikat kemanusiaannya, untuk berguna bagi dirinya dan orang lain, serta bagi bangsa dan negaranya. Serta yang paling esensi anak-anak terlantar dapat meraih kemanusiaannya dengan merasa dihargai sebagai manusia yang punya manfaat dan berguna bagi banyak orang.

Berbagai kecerdasan sebagai hakikat manusia dapat dikembangkan melalui pendidikan yang memanusiakan. Darmiyati Zuchdi (2009) menjelaskan secara lugas bahwa tanpa berbagai kecerdasan apalagi menekankan pada kecerdasan intelektual saja, maka pendidikan tidak lagi memanusiakan. Selanjutnya dijabarkan bahwa tanpa kecerdasan rohaniah dalam mengembangkan ilmu telah timbul kehampaan bahkan sepi di tengah keramaian, miskin nilai-nilai kerohanian di tengah limpahan kekayaan harta benda. Tanpa kecerdasan kultural dapat mengoyak nilai nasionalisme. Tanpa kecerdasan sosial sebuah negara bisa menjadi tidak sensitif terhadap

golongan masyarakat dhuafa, masyarakat marginal seperti anak fakir miskin, anak jalanan, anak terlantar dan sebagainya. Tanpa kecerdasan emosional kemunafikan akan merajalela karena hilangnya daya untuk mengejawantahkan kebaikan. Tanpa kecerdasan intelektual suatu bangsa akan terlena dalam lembah kesedang-berkembangan.

Kecerdasan religius dikembangkan melalui pembinaan dalam panti oleh para pengasuh melalui ceramah agama, kegiatan ibadah di masjid dan sebagainya. Kecerdasan religius memberikan banyak kesempatan kepada manusia untuk berbuat yang disertai rasa cinta yang melahirkan rasa tanggung jawab, dengan menempatkan rasa cinta kepada Tuhan sebagai kebenaran tertinggi. Dalam proses pengembangan ilmu, kecerdasan religius memberikan pencerahan baik pada aspek ontologis, epistemologis maupun aspek aksiologis.

Kecerdasan kultural, juga merupakan wujud dari makna pendidikan yang memasyarakatkan. Dengan pendidikan maka anak-anak terlantar tidak lagi terjebak dalam budaya kemiskinan, yang termanifestasi dalam sikap apatis, selalu menyalahkan pihak lain, tidak tahu harus berbuat apa, dan terisolasi secara psikologis dengan lingkungan sosial. Pendidikan membangkitkan kecerdasan kultural. Kecerdasan kultural terkait dengan gagasan, konsep dan pemikiran, serta terkait dengan kegiatan-kegiatan sebagai wujud kebudayaan dalam memproduksi berbagai kebutuhan hidup. Pendidikan anak-anak terlantar mengembangkan kecerdasan kultural ini melalui kegiatan keterampilan dalam panti dan juga kegiatan keterampilan yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga-lembaga kursus dan Balai Latihan Kerja.

Kecerdasan sosial, aktualisasinya berupa keterampilan sosial, mencakup kecakapan berkomunikasi dan bekerja sama tidak hanya lisan tetapi juga tertulis dalam berbagai konteks. Keterampilan berkomunikasi dicirikan oleh sikap berani mengemukakan pendapat secara santun tanpa melukai hati atau perasaan orang lain. Keterampilan sosial ini dikembangkan dalam panti selain melalui kegiatan-kegiatan gotong royong, kegiatan seni dan olah raga, juga dikembangkan dengan melatih anak-anak panti untuk menjadi pengurus mesjid dalam panti dan sebagainya. Semua kegiatan itu dilakukan untuk mengasah keterampilan sosial yang selama ini dirasakan hilang, karena dikungkung oleh budaya kemiskinan dan stigma sebagai anak terlantar.

Kecerdasan emosional, yang mencakup beberapa aspek dari sikap kemanusiaan seseorang seperti; ketekunan, pengendalian diri, semangat, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Kecerdasan emosional bagi anak-anak terlantar sangat diperlukan untuk meminimalisir tumbuh dan berkembang sifa-sifat mementingkan diri sendiri, mengutamakan tindak kekerasan, serta sikap antipati terhadap orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional dapat mengendalikan diri, memiliki kontrol moral, memiliki kemauan yang baik, dapat berempati terhadap perasaan orang lain, serta peka terhadap penderitaan orang lain, sehingga memiliki watak terpuji dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kegiatan dalam panti seperti kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama-sama, membantu ibu asuh dalam memasak, makan secara bersama-sama dalam panti dan lain-lain dapat menumbuhkan kecerdasan emosional bagi anak-anak terlantar.

Kecerdasan Intelektual, untuk mengembangkan anak-anak terlantar mampu berpikir rasional dan berpikir kritis, dalam menyikapi kehidupannya. Kemampuan intelektual ini dikembangkan melalui pendidikan di luar panti dengan mengikuti sekolah-sekolah formal. Sedangkan kegiatan dalam panti merupakan kegiatan tambahan seperti les mata pelajaran dan sebagainya. Kecerdasan intelektual tetap penting dalam rangka mengembangkan sikap rasional dan sikap kritis pada fenomena kehidupan yang dialaminya.

Tanpa pendidikan, anak-anak terlantar tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan berbagai kecerdasan manusiawi tersebut, sehingga praktis mereka tidak dapat mengembangkan makna pemanusiaan dalam pendidikan. Malah justru sebaliknya, mereka tetap terikat oleh rantai kebodohan dan kemiskinan, yang akhirnya membentuk budaya kemiskinan yang terimplementasi dalam sikap-sikap negatif dalam menghadapi kehidupannya.

Ketiga, makna **keadilan**, pendidikan sesungguhnya merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah sepatutnya anak-anak terlantar memperoleh pendidikan atas biaya pemerintah. Pendidikan anak terlantar sangat penting, karena tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan. Bahkan menurutnya anak-anak yang bermasalah dengan hukumpun berhak memperoleh pendidikan.

Pernyataan Sumantri tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang dasar 1945 Bab XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Pasal 31. Dalam ayat (1) Pasal 31 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal itu berarti tidak boleh ada perbedaan diantara warga negara, atau kelompok-kelompok masyarakat dalam hal kesempatannya untuk memperoleh pendidikan. Jika kelompok masyarakat marginal yang di dalamnya terdapat masyarakat miskin dan anak-anak terlantar, tidak mampu secara finansial untuk membiayai pendidikannya, maka negara wajib membiayainya. Hal tersebut dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 31 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dua ayat tersebut sudah cukup jelas memberikan amanat bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan diberinya kesempatan anak-anak terlantar untuk memperoleh pendidikan dengan biaya pemerintah, maka dapat dimaknai sebagai sebuah pendidikan yang berkeadilan sosial serta non diskriminasi antar warga negara, terutama bagi kalangan mampu dengan masyarakat miskin, meskipun dalam praktiknya belum optimal makna tersebut terimplementasi.

Makna keadilan yang terkandung dalam pendidikan anak terlantar, dapat ditelusuri secara akademis melalui gagasan John Rawls dalam *A Theory of Justice*, sebagaimana dirujuk oleh Choirul Mahfud yang menjelaskan bahwa, keadilan pada dasarnya merupakan sebuah *fairness* atau *pure procedural justice*. Rawls ingin menjelaskan suatu teori keadilan yang tidak boleh mengabaikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak memihak, sehingga memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang (Mahfud, 2009).

Keempat, makna **pemberdayaan**, jika dicermati pernyataan yang diungkapkan secara implisit mengandung makna pemberdayaan yang dilakukannya sebagai Pekerja Sosial yang ikut membina anak-anak terlantar dan dapat menyaksikan anak didiknya berhasil di masyarakat, selain itu pernyataan itu juga bermakna bahwa pendidikanlah yang telah mampu mengubah nasib anak-anak terlantar yang telah dibinanya bertahun-tahun, kemudian mampu menjadi orang-orang yang berguna di masyarakat, baik berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya dan bagi masyarakat serta berkontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan Pendidikan, anak-anak terlantar tidak menjadi beban masyarakat secara terus menerus sepanjang hidupnya, karena pendidikan memungkinkan mereka untuk membuka cakrawala berpikir, membuka mata dan telinga dalam menghadapi fakta kehidupan dengan melakukan sesuatu yang bermakna bagi eksistensinya.

Proses pendidikan anak-anak terlantar merupakan suatu proses membantu memberdayakan anak-anak yang berasal dari kalangan masyarakat marginal, yang berada dalam keadaan tidak berdaya, karena tiadanya modal baik modal ekonomi, modal budaya maupun modal simbolik. Proses pemberdayaan tersebut memerlukan intervensi pemerintah, agar anak-anak terlantar menjadi berdaya, dalam arti mampu bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, maupun dalam kehidupan sosial. Makna pendidikan anak terlantar sebagai pemberdayaan menjadi relevan dengan konsep penanggulangan kemiskinan, karena penerapan pemberdayaan paling banyak digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan melalui empat jalur strategis, yaitu; perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial (Wrihatnolo, 2007). Perluasan kesempatan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya, dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam upaya memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin, dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan peningkatan kapasitas dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar, dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Strategi perlindungan sosial dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok masyarakat rentan, seperti; fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya.

Pendidikan anak terlantar yang mengandung makna pembebasan, pemanusiaan, keadilan, dan pemberdayaan, sejalan dengan teori praktik sosial Pierre Felix Bourdieu. Bourdieu

menjelaskan terjadinya praktik sosial bertalian erat dengan tiga konsep yaitu habitus, modal, dan ranah. Habitus diartikan sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama, yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur secara objektif. Habitus merupakan struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial (Maizier, 2009). Individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realitas sosial. Jika anak-anak terlantar menghadapi realitas sosial dengan sikap apatis, tidak ada motivasi, skeptis, dan sikap negatif lainnya, hal itu disebabkan oleh karena habitus yang membentuk struktur kognitifnya secara terus menerus. Oleh karena itu mereka membutuhkan pendidikan agar terbebas dari sekat ruang sosial kaum marginal secara terus-menerus, dengan demikian mereka bisa membentuk atau terbentuk dalam habitus yang berbeda. Dalam konteks inilah pendidikan bermakna untuk membebaskan anak-anak terlantar dari berbagai realitas sosial yang membentuk dalam habitusnya, seperti kemiskinan, kebodohan, stigma marginal dan sebagainya.

Sedangkan konsep ranah sebagai ruang sosial, tempat para individu berebut berbagai modal. Dalam ruang sosial ini individu dengan habitusnya, berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial, yang menghasilkan tindakan sosial. Tindakan sosial yang dihasilkan oleh individu, akan terjadi sesuai dengan ranah dan modal yang dimilikinya. Dalam konteks anak-anak terlantar dengan habitus kaum marginal yang membentuk struktur kognitifnya, dan dengan ranah yang sangat terbatas hanya pada komunitasnya saja, serta tidak adanya modal yang dimiliki, baik modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya, maka tindakan sosial yang dapat dilakukan ialah mengemis, bekerja di jalanan dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya intervensi pemerintah dalam bentuk layanan pendidikan. Intervensi dalam bentuk layanan pendidikan bagi anak-anak terlantar merupakan sesuatu hal yang sangat berarti bagi mereka, sehingga dimaknai sebagai sebuah keadilan, dalam menggapai cita-citanya sebagai anak manusia. Intervensi tersebut berupa bantuan modal ekonomi, modal sosial dan modal budaya, sehingga anak-anak terlantar menjadi berdaya, mengubah habitusnya menuju ruang sosial yang lebih luas.

Praktik sosial merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah, dan ranah yang juga merupakan produk sejarah. Dalam ranah terjadi pergulatan kekuatan-kekuatan antara individu yang memiliki banyak modal, dengan individu yang tidak memiliki banyak modal. Agar individu dapat hidup secara baik maka diperlukan modal, bahkan modal tersebut dapat menjadi kekuatan dalam perjuangan individu dalam ranah sosialnya. Dengan demikian praktik sosial merupakan hasil dari relasi-relasi habitus, modal dan ranah.

Proses pemberdayaan anak-anak terlantar, sehingga mampu mencapai membebaskan hakikat kemanusiaannya yang terkungkung oleh stigma kumuh, sampah masyarakat, dan sebagainya, juga dimaknai sebagai tindakan yang adil. Dalam konteks inilah pendidikan menjadi pintu masuk sekaligus pintu keluar bagi pengentasan keterlantaran anak di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat.

BAB XIV

SOLUSI LAYANAN PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR

Berdasarkan fakta-fakta empiris anak-anak terlantar dan layanan pendidikannya, serta konsep-konsep dan teori-teori, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk layanan pendidikan anak terlantar. Beberapa fakta empiris anak terlantar tersebut di antaranya.

1. Fenomena anak-anak terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah fakta yang cukup krusial, semakin tahun semakin meningkat, sehingga merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanganan secara serius oleh berbagai pihak. Fenomena tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor kemiskinan merupakan faktor dominan sebagai pemicu munculnya berbagai faktor lainnya yang pada akhirnya bermuara kepada terjadinya anak-anak terlantar.

Faktor-faktor lainnya seperti banyaknya masyarakat yang menjadi TKW/TKI ke luar negeri dan meninggalkan anak-anak mereka bersama neneknya di rumah. Sementara itu kondisi perekonomian keluarga yang ditinggalkan juga terbelit kemiskinan yang menimbulkan masalah tersendiri dalam memenuhi hak-hak dasar anak. Selain itu tingginya angka kematian ibu melahirkan sebagai implikasi dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat, juga menimbulkan korban pada anak-anak yang ditinggalkan, karena praktis anak-anak mereka tidak terurus, tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, minum, sandang, papan apalagi pendidikan. Masalah TKI/TKW ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama, serta masalah tingginya angka kematian ibu melahirkan berimplikasi juga terhadap tingginya angka kawin

cerai, hal tersebut praktis berdampak pada terlantarnya anak-anak mereka.

Dengan demikian faktor-faktor penyebab keterlantaran anak dapat dimaknai sebagai; dampak kemiskinan struktural, yang menyebabkan rendahnya modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik.

2. Kedua, ditinjau dari segi manajemen pendidikan anak terlantar yang dikelola pada Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram, dari perspektif perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi hanya untuk 80 orang anak terlantar dari 201.699 anak terlantar pada tahun 2011. Dari segi kuantitas anak-anak yang dilayani sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah anak-anak terlantar yang memerlukan uluran pemerintah. Namun demikian sekecil apapun yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan sesuatu yang sangat berarti dibandingkan tidak melakukan sesuatu sama sekali. Ditinjau dari aspek perencanaannya, dilakukan sesuai proses sistem perencanaan yang baku di Nusa Tenggara Barat. Namun demikian masih bersifat rutinitas, dan tidak berdasarkan kebutuhan fakta lapangan, hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran, terbukti dengan pengalokasian anggaran sudah diberikan pagu dari atas. Dalam pengorganisasian dilakukan dengan mengoordinasikan semua sumber daya yang ada baik sumber daya insani maupun sumber daya non insani. Termasuk berkoordinasi secara sektoral dan lintas sektoral. Koordinasi sektoral misalnya dengan Dinas Sosial seluruh Kabupaten/Kota, dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi. Sedangkan koordinasi lintas sektoral dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, para Kepala Sekolah, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Camat, Lurah, Kepala Desa dan sebagainya. Berkaitan dengan implementasi dari program kerja yang telah disusun dalam perencanaan dilaksanakan mulai dari pendekatan awal, penerimaan melalui seleksi calon anak asuh, pelayanan, pembinaan, tahap resosialisasi hingga pembinaan lanjut atau disebut dengan *home visit* bagi eks-anak asuh yang telah menyelesaikan pendidikan dan telah kembali ke dalam keluarganya. Sedangkan dalam bidang pengendalian dilakukan dengan beberapa hal seperti pembahasan kasus.

Dengan demikian dalam bidang manajemen pendidikan anak terlantar dapat dimaknai sebagai minimnya kehadiran negara dalam memfasilitasi anak-anak terlantar untuk memperoleh pendidikan, dalam perspektif teori hegemoni Gramsci disebut sebagai kekerasan simbolik. Terbukti hadirnya negara hanya melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil yang dikelola oleh Panti Sosial. Sedangkan pendidikan seharusnya menjadi ranah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

3. Ketiga, model pendidikan anak terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan model semi panti. Karena tidak semua kegiatan dilakukan di dalam panti, juga tidak semua kegiatan dilakukan di luar panti. Di dalam panti dilakukan berbagai kegiatan pendidikan seperti; kegiatan les mata pelajaran, ceramah agama, kegiatan keterampilan sosial seperti kegiatan olahraga, gotong royong membersihkan lingkungan panti, dan juga membantu ibu asuh menyediakan masakan di dapur bagi anak-anak panti yang perempuan. Sedangkan kegiatan di luar panti meliputi kegiatan utama yaitu sekolah, dan juga kursus keterampilan serta mengikuti latihan keterampilan di Balai Latihan Kerja bagi yang telah lulus jenjang SMA/SMK.

Model pendidikan anak terlantar yang ambigu dapat dimaknai sebagai tidak seriusnya pemerintah menangani pendidikan anak terlantar, sehingga terkesan menjadi proyek pemerintah, agar tampak ada kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Akan tetapi tidak menyelesaikan persoalan secara mendasar.

4. Keempat, dilihat dari perspektif kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bidang pendidikan anak terlantar dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil kebijakan yaitu dengan menampung anak-anak terlantar melalui Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram untuk disekolahkan dari jenjang Sekolah Dasar sampai jenjang SMA/SMK, meskipun dengan jumlah baru mencapai 80 anak setiap tahunnya.

Dengan demikian dalam perspektif kebijakan pemerintah daerah dapat dimaknai sebagai hegemoni negara terhadap kelompok marginal dalam hal ini anak-anak terlantar. Dengan argumentasi kebijakan tersebut tidak berpihak kepada kelompok marginal, namun dengan mudah mendapat konsensus tanpa ada gugatan dari

pihak-pihak yang berkepentingan, seolah-olah kebijakan tersebut sudah sepatutnya demikian.

5. Kelima, ditinjau dari akses pendidikan anak terlantar baik dari segi perluasan maupun pemerataan, belum mampu melayani semua anak terlantar dapat memperoleh pendidikan. Ketersediaan akses bagi anak-anak terlantar masih sangat sedikit, dilihat dari segi formasi yang tersedia untuk anak-anak terlantar memperoleh pendidikan untuk tahun 2012 hanya 6 orang, sedangkan jumlah anak-anak terlantar seluruh Kabupaten/Kota sudah mencapai angka ratusan ribu. Dari segi keterjangkauan juga sangat rendah. Tidak adanya perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak terlantar dapat dimaknai sebagai lemahnya kekuatan memaksa dari peraturan perundangan yang seharusnya ditegakkan oleh penyelenggara negara. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya kekerasan simbolik lembaga-lembaga negara dalam hal ini diwakili institusi yang menangani pendidikan dengan mengabaikan hak anak terlantar memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya.
6. Keenam, makna penting pendidikan bagi anak-anak terlantar yang dikemukakan berbagai pihak hampir senada, yang menjelaskan bahwa makna pendidikan anak terlantar ialah bermakna pembebasan, pemanusiaan, bermakna keadilan, dan makna pemberdayaan. Pembebasan bisa mengandung arti yang universal; bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari lingkaran kemiskinan.

Mengacu pada fakta empiris tersebut, maka dapat diberikan beberapa solusi yang merupakan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan utamanya dengan masalah pendidikan anak terlantar, untuk dijadikan pemikiran dalam membuat kebijakan, serta mencari solusi penanganan masalah yang serupa di tahun-tahun mendatang.

1. Pertama, tidak ditangani secara serius dan mengakar. Oleh karena itu pemerintah perlu menangani keterlantaran anak tidak secara parsial, tetapi ditangani secara sistemik dengan mengurangi angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan dapat dikurangi secara efektif dalam jangka pendek dengan memperluas penyediaan lapangan kerja, dengan memperbanyak program-program pembangunan yang berorientasi pada proyek-proyek padat karya. Dalam jangka panjang dengan mencanangkan gerakan nasional

pendidikan anak terlantar yang dibiayai dengan APBN. Gerakan Nasional Pendidikan Anak Terlantar jika terlaksana dengan baik, dapat membatalkan terjadinya generasi yang hilang, bagi sebuah bangsa. Dengan pendidikan, maka anak-anak terlantar akan memutus reproduksi kelas marginal, dan mampu meningkatkan kelas sosialnya.

2. Kedua, dalam bidang manajemen pendidikan anak terlantar, terutama pada aspek perencanaan sebaiknya berdasarkan data lapangan, sehingga semua anak terlantar dapat memperoleh haknya untuk mendapat pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran mengingat tingginya angka anak-anak terlantar, dapat dilakukan pembiayaan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengorganisasian semestinya ditangani oleh Pemerintah Pusat, tidak hanya terbatas pada Pemerintah Provinsi. Pelaksanaannya bisa didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tetap dikendalikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian pendidikan Nasional dan Kementerian Sosial.
3. Ketiga, berkaitan dengan model pendidikan anak terlantar, sudah saatnya lebih diutamakan pendidikan berbasis keluarga, pendidikan yang berbasis panti semestinya menjadi pilihan terakhir jika anak-anak terlantar sama sekali tidak bisa ada tempat perlindungan dalam keluarga. Pendidikan anak terlantar yang berbasis keluarga, secara konsep tampak lebih manusiawi dibandingkan pendidikan model panti. Karena dalam keluarga anak-anak dimungkinkan memperoleh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai dalam keluarga.
4. Keempat, sudah sepatutnya ada kebijakan pemerintah Daerah bidang pendidikan yang memihak terhadap kepentingan anak terlantar. Hal tersebut menjadi penting, karena pendidikan merupakan hak semua warga negara, tidak terkecuali anak-anak terlantar.
5. Kelima, Akses pendidikan anak-anak terlantar perlu diperluas, baik dari segi ketersediaan sarana prasarana sekolah, maupun dari segi keterjangkauan terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa sebaiknya ditanggung oleh negara, dengan demikian semakin tahun anak-anak terlantar akan semakin berkurang dari segi jumlah dan pertumbuhannya.

6. Keenam, diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat yang tergolong masyarakat marginal tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, agar dengan kesadaran, mereka ikhlas bilamana anak-anak mereka disekolahkan dengan bantuan pemerintah. Dengan demikian anak-anak tidak dipaksa untuk bekerja berkeliaran di jalanan untuk membantu ekonomi orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Manajemen Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adi, Rukmino. 1994. *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anasiru, Ronawaty. 2011. *Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makasar*. Jakarta: Sosiokonsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol, 16 No. 2 Mei-Agustus.
- Arikunto, Suharsimi, dan Yuliana, Lian. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media bekerja sama dengan FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. 2011. *Pendidikan Yang Membebaskan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Kerjasama dengan BAPPEDA Provinsi NTB. 2011. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*.
- Bocock, Robert. 1986. *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni* terjemahan Ikramullah Mahyudin. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, Pierre. 2009. *Habitus, Modal dan Ranah*. Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Bandung: Jalasutra.
- Bryan S. Turner. 2012. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cohn, Elchanan. 1979. *The Economic of Education*. United State of Amerika: Ballinger Publishing Company.
- Coombs, Philip H. 1979. *The World Crisis in Education*. United State of Amerika: Ballinger Publishing Company.

- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiri & Research Design*. London: Sage Publication.
- Creswell, John W. 2012. *Educational Research*. USA: Pearson Education, Inc, 2012.
- Dinas Sosial Lampung. 2011. *Pengertian dan Karakteristik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* (PMKS). <http://dinsoslampung.web.id/>
- Dinas Sosial Provinsi Lampung. 2011. *Pengertian dan Karakteristik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. <http://dinsoslampung.web.id/>.
- Fakih, Mansour. 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatony, Achmad. 2011. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Aessment: Kasus Yogyakarta*. Jakarta: Sosiokonsepria Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 2, Mei-Agustus.
- Foucault, Michel. 2002. *Wacana Kuasa Pengetahuan*, terjemahan Yudi Santosa. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Freire, Paulo. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hanifah, Abu dan Suyanto. 2010. *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja*. Jakarta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 15, No. 03.
- Hardiman, Budi. 2011. *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern*. Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, Jakarta: Erlangga.
- Haryatmoko. 2003. *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*. Jakarta: Basis.
- <http://www.indonesia-tourism.com/west-nusa-tenggara/map.html>,
West Nusa Tenggara Tourism Map.
- <http://www.lomboktravelnet.com/info/peta-pulau-lombok.html>.
2012. *Peta Pulau Lombok*.
- <http://www.tamboratrek.com/about-sumbawa-island.htm>. 2012.
Peta Pulau Sumbawa.
- Indrajit, R. Eko, & Djokopranoto, R. 2006. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001, *Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*.
- Kompas. 2011. *Jumlah Siswa Miskin di Indonesia*. <http://www.kompas.com/>
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi, Konsepsi Pedoman dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna. Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, Choirul. 2009. *39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia*. Surabaya: Jaring Pena Lini Penerbitan JP Books.
- Maizier, Pipit. 2009. *Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Media Center. 2011. *Program Unggulan-Inspirasi, ABSANO dan ADONO serta AKINO. Butuh Komitmen Semua Pihak, 27 September*.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- MSW, B. Mujiyadi, dkk. 2011. *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*. Jakarta: P3KS Press.
- Muchtar. 2010. *Pembantu Rumah Tangga Asal Indonesia di Singapura dan Implikasinya Bagi kebijakan Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Jurnal Informasi, Vol. 15, No. 01.
- Nasirin, Chairun. 2010. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial*. Disertasi, Universitas Brawijaya.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. *Data dan Informasi Pendidikan Tahun 2010/2011*.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. 2009-2013.
- Raco, Jozef R., & Tanod, Revi Rafael H.M. 2012. *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Entrepreneurship*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Riyanto, Yatim. 2003. *Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*. Surabaya: SIC.
- Robbins, Stephen P. & Mary Coulter. 2012. *Management, Global Edition*. England: Pearson Education Limited.
- Saroni, Muhammad. 2010. *Orang Miskin Harus Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Saroni, Muhammad. 2011. *Orang Miskin Bukan Orang Bodoh*. Yogyakarta: Bahtera Buku.
- Schermerhorn, John R. 2010. *Introduction To Management*. USA: John Wiley & Sons Inc.
- Setiawan, Hari Harjanto, & Wardhani, Adhani. 2010. *Kelompok Belajar Kancil Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penjual Kresek di Pasar Ujung Berung*. Jakarta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 15 No. 2.
- Sitepu, Anwar, dan Irmayani. 2010. *Isu-Isu Penelantaran, Pengucilan, dan Kerentanan Anak di Jakarta Barat*. Jakarta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 15, No. 03, September-Desember.
- Stake, Robert E. 2010. *Qualitative Research, Studying How Things Work*. New York: The Guilford Press.
- Sumarno, Setyo, dkk. 2004. *Model Penanganan Anak Terlantar Berbasis Kekerabatan*. Jakarta: Puslitbang UKS-Balatbang Sosial-Departemen Sosial.
- Sumodiningrat dalam Habibullah. 2010. *Sebaran Masyarakat Miskin dan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan pancoran Mas Depok Jawa Barat*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 15 No. 01.
- Suradi & Pudjianto, Bambang. 2010. *AnakJalanan dan Penanggulangannya*. Jakarta: P3KS Press.
- Suradi. 2009. *Perlindungan Sosial Bagi Anak-Anak Fakir Miskin: Strategi Memutus Mata rantai Kemiskinan*. Jakarta: Jurnal Informasi, Vol 14 No.03.
- Suyadi. 2011. *Miskin Bukan Halangan Sekolah Buku Bacaan Inspiratif Pendobrak Keterpurukan*. Yogyakarta: Bukubiru.
- Tampubolon, Joyakin, dkk. 2007. *Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Studi Evaluasi di Delapan Daerah Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Tilaar, H.A.R. & Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB, *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan NTB*. 2011.
- Tim Peneliti Unicef, Save the Children dan Kementerian Sosial. 2007. *Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Panji Grafika Jaya.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, *Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Usman, Husaini. 2010. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Nurdin. 2010. *Potret Remaja Terlantar Studi Kasus Pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)*. Jakarta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 15, No, 01 Januari-April.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Wrihatnolo, Randy R., & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Wulandari Ari dan Siswadi. 2011. *Sukses Anak Jalanan Pertama Yang Menjadi Presiden Direktur*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yusuf, Rusli. 2011. *Pendidikan dan Investasi Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Zuchdi, Darmiyati. 2009. *Humanisasi Pendidikan, Menemukan Kembali Pendidikan Yang manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.

INDEKS

A

Anak terlantar, 9
Anak Terlantar, 102
Anak-anak, 6, 11, 51, 53, 76,
78
Anak-Anak, 102, 107

B

Bourdieu, 5, 37, 38, 39, 40, 52,
53, 78, 79, 80, 89, 99, 101
Budaya, 50, 100, 107, 108
Buta Aksara, 4

E

Ekonomi, 42, 100, 107

F

Foucault, 35, 36, 37, 73, 84, 85,
100
Freire, 2, 15, 16, 37, 84, 100

G

Global, 101, 103
Gramsci, 33, 66, 72, 73, 95

H

Hegemoni, vii, 33, 72, 99
Humanisasi, 103

K

Kekuasaan, vii, 35, 36, 73, 102
Kemampuan, 87, 108
Kemiskinan, 13, 14, 17, 46, 48,
49, 100, 102, 103
Kesehatan, vii, 8, 45, 108
Keterlantaran, 52

P

Pariwisata, vii, 44
Pembebasan, 96
Pendidikan, v, vii, 1, 2, 3, 4, 10,
14, 15, 16, 17, 29, 31, 43, 44,
55, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
88, 89, 94, 95, 97, 99, 100,
101, 102, 103, 106, 107,
108
Pendidikan Anak Terlantar,
70, 97
Perekonomian, vii, 43
political will, 78, 80, 82
Politik, 101
Praktik sosial, 91
Praktik Sosial, vii, 37

PROFIL PENULIS



Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. dilahirkan di Klungkung, Bali pada tanggal 11 Agustus 1966. Pada tahun 1990 mengikuti studi jenjang S-1 dan lulus sebagai sarjana sosial pada tahun 1994 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA-LAN RI) Jakarta, dengan Program Studi Administrasi Negara. Pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 di Universitas Indonesia Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, dan selesai pada tahun 1999. Pada tahun 2003 kembali mengikuti pendidikan jenjang S2 dengan Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya dan berhasil diselesaikan pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2010 mengikuti program doktor di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan dan selesai pada tahun 2013.

Tahun 1985 bekerja di Kementerian Agama RI Jakarta sampai tahun 2001. Akhir tahun 2001 dimutasi sebagai Kepala Bagian sekaligus sebagai staf pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, Filsafat Ilmu, Manajemen Pendidikan, Administrasi Pendidikan, dan Pengantar Pendidikan pada Program S1 dan Program S2. Jabatan fungsional saat ini adalah lektor kepala (IV C). Aktif mengikuti berbagai seminar baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta.

Menikah dengan Ni Luh Armoni (Alm) istri pertama dikaruniai satu orang putri yakni Ni Luh Drahati Ekaningtyas alumni S1 Fakultas Psikologi UGM, dan S2 Fakultas Psikologi UNAIR. Menikah kembali dengan Dr. Ni Putu Listiawati seorang dosen pada kampus yang sama, dan dikaruniai tiga orang putri; Ni Made Laksmi Sukmaningtyas saat

ini sedang Pendidikan AKPOL, Komang Somya Gitaningtyas sedang studi di ITS, dan Ketut Saraswati Wulaningtyas, masih studi di SMA.

Selain buku Pengantar Filsafat Ilmu, beberapa buku yang sudah dipublikasikan oleh penulis yaitu; Manajemen Pendidikan Anak-Anak Terlantar Studi Fenomenologi di Nusa Tenggara Barat, dan Kapita Selekta Pendidikan.

Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM. lahir di Kuta, Bali pada tanggal 15 Oktober 1966. Pada tahun 1990 menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Pada tahun 1999 menyelesaikan pendidikan jenjang magister pada Program Studi Manajemen Keuangan, PPM *School of Management* Jakarta. Pada tahun 2010 menyelesaikan pendidikan doktor pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.



Tahun 2001 penulis mulai menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu antara lain, Metodologi Penelitian, Pengantar Akuntansi, Komunikasi Massa, Etika Bisnis, dan Seminar Proposal Penelitian. Jabatan fungsional pada saat ini adalah lektor kepala (IVa). Mulai tahun 2014 sampai dengan saat ini penulis juga merupakan asesor BAN-PT. Selain itu penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, dll baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber.



Ni Luh Drajadi Ekaningtyas, S.Psi., M.Psi.

lahir di Jakarta, 10 Januari 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan S2 pada program Magister Profesi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga. Penulis merupakan staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram sejak tahun 2018. Beberapa mata kuliah yang penulis ampu antara lain: Psikologi Komunikasi, Psikologi Perkembangan Fisik dan Motorik, Psikologi Perkembangan Kognitif dan Bahasa, Psikologi Perkembangan Sosial, Emosi, dan Moral, Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Sosial.

Artikel ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain: Pengaruh *Job Insecurity* terhadap *Employee Engagemnet* dengan *Perceived Organizational Support* sebagai Variabel Mediator pada Karyawan Hotel (2016), Menumbuhkan Budaya Literasi Pada Siswa Sekolah Dasar dengan Gangguan Autisme (2019), *Parenting Education* guna Meningkatkan *Parenting Self-Efficacy* pada Orang Tua dari Anak dengan Gangguan Autisme (2019), Psikologi Komunikasi untuk Memaksimalkan Internalisasi Nilai-nilai Toleransi pada Anak Usia Dini (2020), *Teacher's Method in Stimulating Psychosocial Development in Early Childhood* (2020), Analisis Kendala dan Solusi Stimulasi Perkembangan Agama Hindu Berbasis Daring pada Anak Usia Dini: Pendekatan Psikologi Pendidikan (2021), Stimulasi Kemampuan *Problem Solving* Anak Usia Dini melalui Permainan Tradisional: Pendekatan Neurosains (2021). *Book chapter* yang pernah diterbitkan: Pandemi COVID-19: Dampak Psikologis dan Upaya Menjaga Kesehatan Mental Masyarakat (COVID-19 Perspektif Agama dan Kesehatan, 2020), Perkembangan Psikososial Anak Usia Prasekolah (Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin, 2020).